LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021

BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2021 telah terselesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Tahunan ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pada tahun 2021, Laporan Tahunan dibuat untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengawasan Tahun 2021 telah kami upayakan sebaik mungkin, untuk dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Pengawasan serta memberikan gambaran dalam upaya nyata melakukan pembenahan terhadap tertib pelaksanaan tugas yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh Aparat Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas, khususnya berkaitan dengan pelayanan penanganan pengaduan dan terwujudnya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.

Jakarta, 21 Februari 2022

Plt.Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

DWIARSO BUDI SANTIARTO

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Kebijakan Umum.....1

B. Visi dan Misi.....1

C. Rencana Strategis.....2

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI.....3

A. *Standard Operational Procedures* (SOP).....8

B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....9

BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.....10

A. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....10

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana..... 46

C. Pengelolaan Keuangan..... 55

D. Regulasi Tahun 2021.....60

BAB IV. PENGAWASAN.....68

A. Program Pembaruan..... 68

1. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan..... 68

2. Pengembangan Aplikasi Epost Terintegrasi dengan Aplikasi Siwas..... 70

3. Pengembangan Integrasi Data Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung dengan Aplikasi PMPZI Kemenpan RB.....71

B. Pengelolaan Sistem Pengawasan.....73

1. Penanganan Pengaduan.....73

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim..... 74

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin.....75

4. Kegiatan Pemeriksaan..... 76

a. Pemeriksaan Reguler.....76

b. Pemeriksaan Monitoring 78

c. Pemeriksaan Audit Kinerja 81

5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja..... 85

6. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)..... 93

7. Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)..... 97

C. Sistem Pengendalian Intern (SPI)..... 99

D. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK..... 102

E. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA RI)..... 103

F. Capaian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.....103

G. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)..... 104

H. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)..... 105

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 106

A. Kesimpulan..... 106

B. Rekomendasi..... 111

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi pengawasan Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Badan Pengawasan diharapkan dapat memberikan perubahan dalam mewujudkan kepercayaan publik kepada badan peradilan.

Penanganan Pengaduan merupakan salah satu kinerja utama pada Badan Pengawasan sebagaimana yang terdapat pada Perma No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Salah satu penunjang keberhasilan penanganan pengaduan tersebut adalah adanya dukungan Teknologi Informasi yang terintegrasi dari pusat sampai pada satker di daerah yang dikenal dengan Aplikasi Siwas MA RI.

Selain Aplikasi Siwas MA RI, Badan Pengawasan juga berupaya mengembangkan Evaluasi sebagai upaya mewujudkan Misi Badan Pengawasan yaitu Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B. Visi dan Misi

Dalam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung", dan dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut Badan Pengawasan telah menetapkan Visi yaitu ***"Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa"".***

Yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

C. Rencana Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan efektif dan efisien.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah
	Persentase penanganan pengaduan tepat wakut		
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan		
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu		
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti		
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti		
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu		
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja		
	Pelaksanaan Zona Integritas		
	Probity Audit PBJ		
	Consulting Probity Audit		
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana		
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan		

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, struktur organisasi badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdiri dari:

1. **Eselon I**

Badan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

2. **Eselon II**

Susunan Organisasi Eselon II Badan Pengawasan terdiri dari :

a. Sekretaris Badan Pengawasan

Sekretariat Badan Pengawasan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
4) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

b. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Sumatera yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teksnis peradilan di wilayah I;
2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

c. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Jawa dan Bali yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;

3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

d. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

e. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksankan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;

2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

3. Eselon III

Organisasi Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Eselon II), yang didukung dengan jabatan struktural dibawahnya yang meliputi :

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta pembuatan Laporan Keuangan dan verifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2) Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara;
3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;
2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
3) Sub Bagian Akuntansi.

b. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai;

2) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, pengajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
2) Sub Bagian Mutasi;
3) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksanana dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;
2) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi;
3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

1) Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan;
2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

d. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh pejabat struktural eselon III yang bertugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Umum mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Sub Bagian Rumah Tangga;
3) Sub Bagian Perlengkapan.

A. Standard Operational Procedures (SOP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2021 telah melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna melengkapi dan menambahkan SOP baru berdasarkan kebutuhan organisasi, yaitu:

SOP Petugas Meja Pengaduan

SOP yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan organisasi dalam penataan hubungan kerja, sehingga diperlukan penambahan SOP baru guna memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada pada Badan Pengawasan, yaitu:

1. SOP Pelayanan Meja Pengaduan Khusus Menerima Laporan Pengaduan

Dengan prosedur sebagai berikut:

a. Petugas meja pengaduan menerima laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis melalui meja pengaduan atau melalui telepon dan meminta identitas pelapor baik secara langsung maupun melalui telepon.

b. Petugas meja pengaduan mencatat dan memberi tanda terima laporan pengaduan yang disampaikan secara tertulis.

c. Petugas meja pengaduan mendampingi/menginput surat pengaduan ke aplikasi SIWAS (Scanning, Klasifikasi surat), meliputi :

- Identitas Pelapor
- Substansi Pengaduan
- Identitas Terlapor
- Lampiran Berkas Pengaduan (jika ada)

Jika pengaduan bersifat tembusan yang ditujukan kepada pimpinan Mahkamah Agung RI / Instansi lain maka petugas meja pengaduan tidak perlu menginput pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS

d. Petugas meja pengaduan memberikan nomor registrasi surat pengaduan dari aplikasi SIWAS rangkap 2 untuk (yang bersangkutan dan TU Sekretariat)

e. Petugas meja pengaduan menyampaikan berkas pengaduan yang telah diinput untuk diberikan ke TU Sekretariat untuk diarsipkan.

2. SOP Pelayanan Meja Pengaduan Khusus Informasi Pengaduan

Dengan prosedur sebagai berikut:

a. Petugas meja pengaduan menerima permohonan informasi dari pelapor
b. Petugas meja pengaduan membuka informasi pengaduan pada aplikasi SIWAS
c. Petugas meja pengaduan menyampaikan informasi pengaduan kepada pelapor (apabila pelapor memerlukan informasi lebih lanjut maka petugas meja pengaduan dapat menghubungi supervisi tindak lanjut)
d. Petugas meja pengaduan mengarahkan ke ruangan yang telah disediakan
e. Supervisi menerima pelapor dan memberikan informasi yang dibutuhkan

B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. Aparatur Badan Pengawasan telah menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi.

Pada tahun 2021 SKP telah diterapkan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat, pensiun dan penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, kenaikan pangkat Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan Honorer yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural :
   - Pejabat Eselon I : - orang
   - Pejabat Eselon II : 5 orang (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
   - Pejabat Eselon III : 3 orang
   - Pejabat Eselon IV : 16 orang
2. Pejabat Fungsional
   - Hakim Tinggi : 42 orang
   - Hakim Yustisial : 24 orang
   - Auditor : 31 orang
   - Auditor Kepegawaian : 9 orang
   - Pustakawan : 2 orang
   - Pranata Komputer : 3 orang
   - Analis Kepegawaian : 2 orang
   - Arsiparis : 1 orang
3. Staff (Fungsional Umum) : 20 orang
4. Honorer (PPNPN) : 16 orang

Pada tahun 2021, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pelaksana dan Honorer, kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Adapun untuk pengelompokan Pejabat Struktural ini berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1.1, tabel 1.1.2, tabel 1.1.3 dan tabel 1.1.4.

Tabel 1.1.1 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	3	12 %
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	8 %
3.	Pembina Tk I (IV/b)	2	8 %
4.	Pembina (IV/a)	4	17 %
5.	Penata Tk I (III/d)	9	38 %
6.	Penata (III/c)	4	17 %

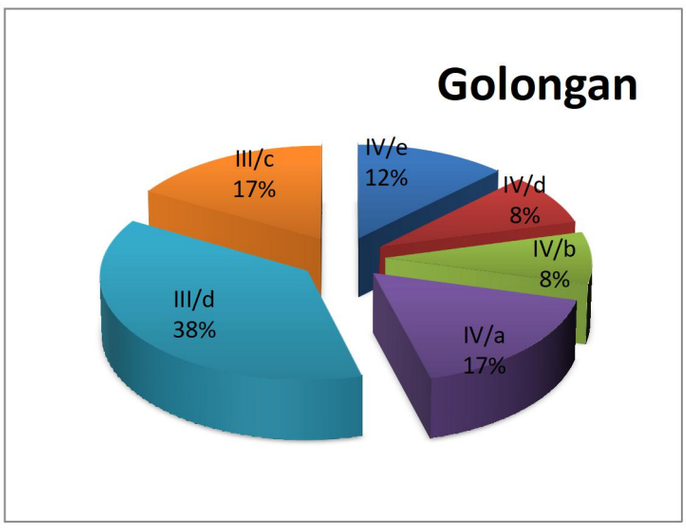

Tabel 1.1.2 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	2	9 %
2.	S2	14	58 %
3.	S1	8	33 %

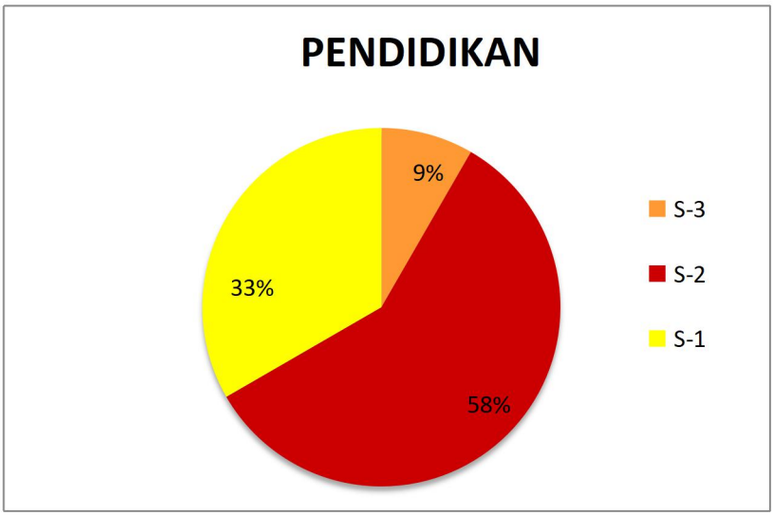

Tabel 1.1.3 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	9	37 %
2.	41– 50	4	17 %
3.	51 – 60	11	46 %

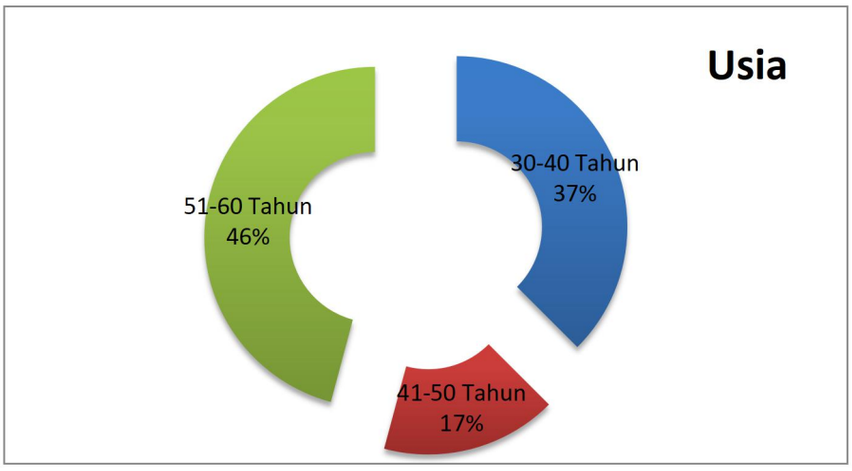

Tabel 1.1.4 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	15	64 %
2.	Wanita	9	36 %

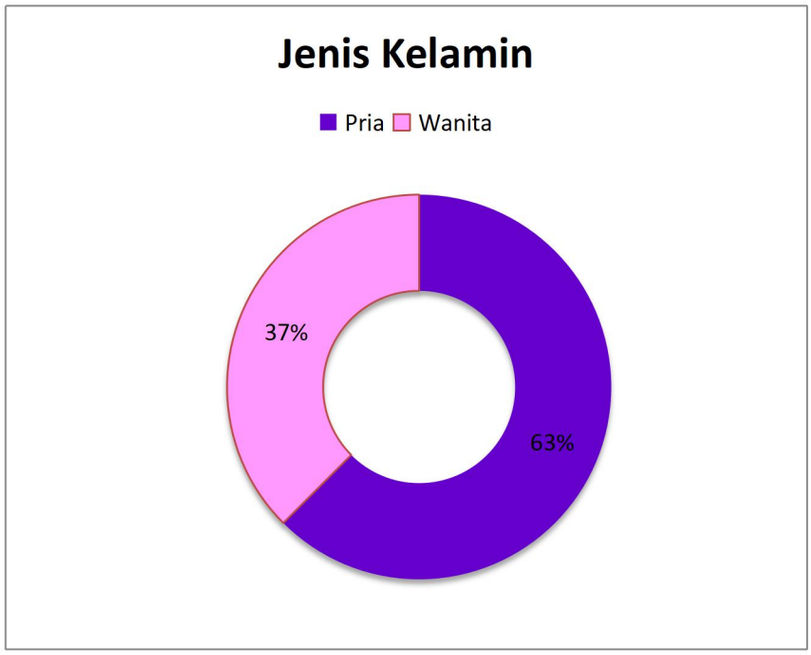

1.2. Pejabat Fungsional

Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 114 (Seratus empat belas) orang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pustakawan, Pranata Komputer dan Arsiparis. Adapun pangkat/golongan, pendidikan, usia dan jenis kelamin tenaga teknis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.2.1 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	32	76 %
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	8	19%
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	3 %
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	2 %

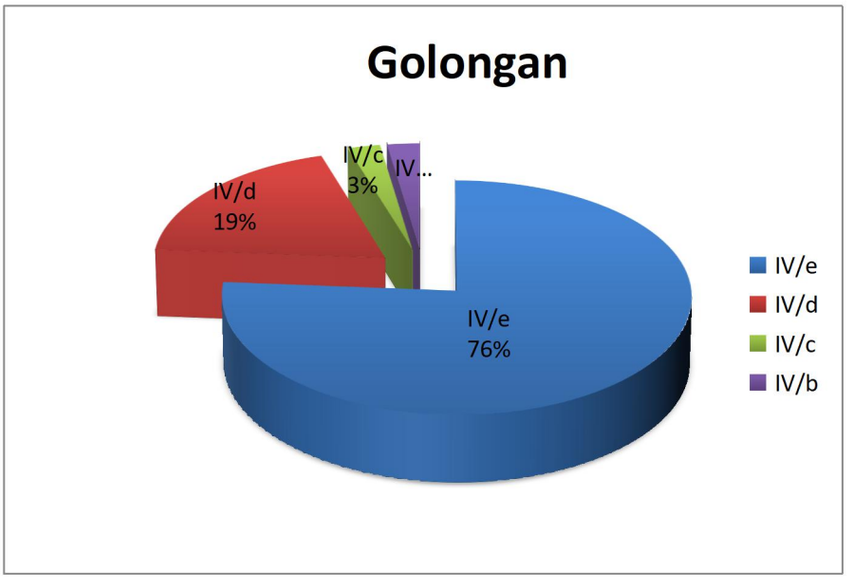

Tabel 1.2.2 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	5	12 %
2.	S2	27	64 %
3.	S1	10	24 %

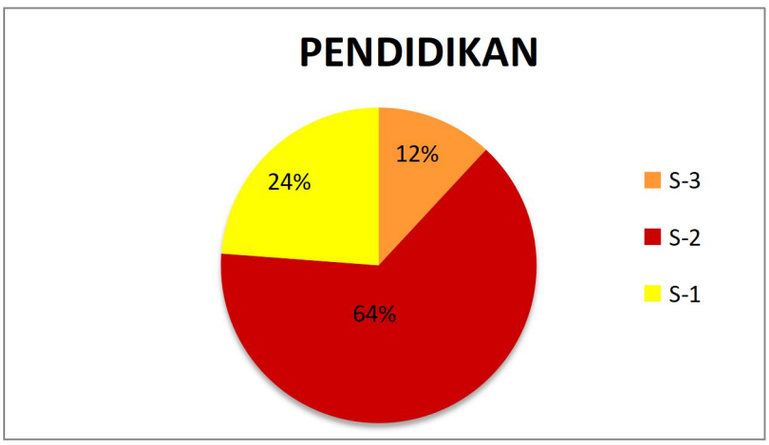

Tabel 1.2.3 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 60	15	36 %
2.	61 – 70	27	64 %

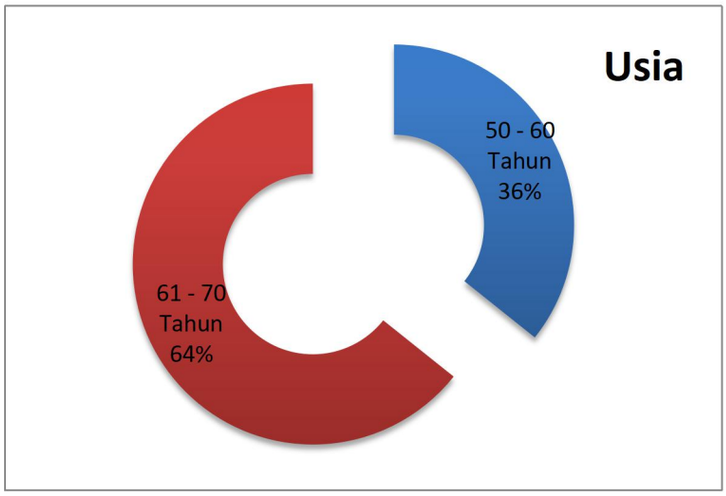

Tabel 1.2.4 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	34	80 %
2.	Wanita	8	20 %

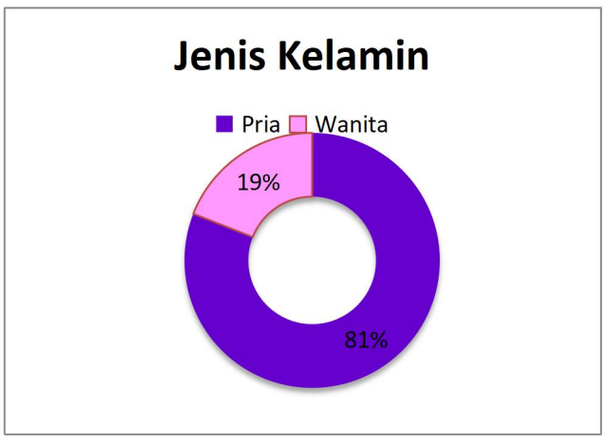

1.3. Hakim Yustisial

Tabel 1.3.1 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	4 %
2.	Pembina (IV/a)	18	752 %
3.	Penata Tk. I (III/d)	3	13 %
4.	Penata (III/c)	2	8 %

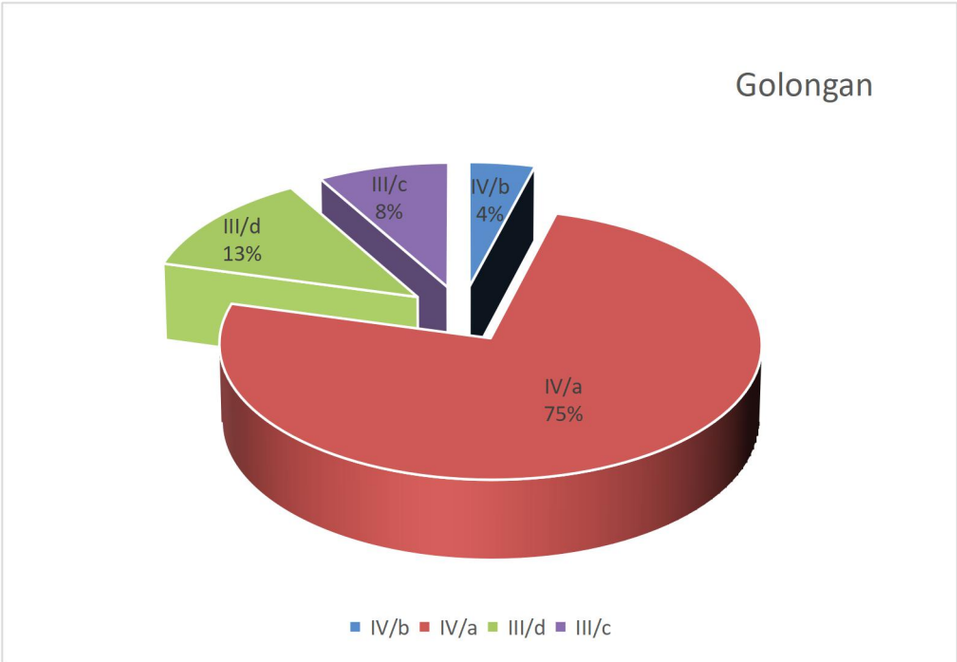

Tabel 1.3.2 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	3	13 %
2.	S2	14	58 %
3.	S1	7	29 %

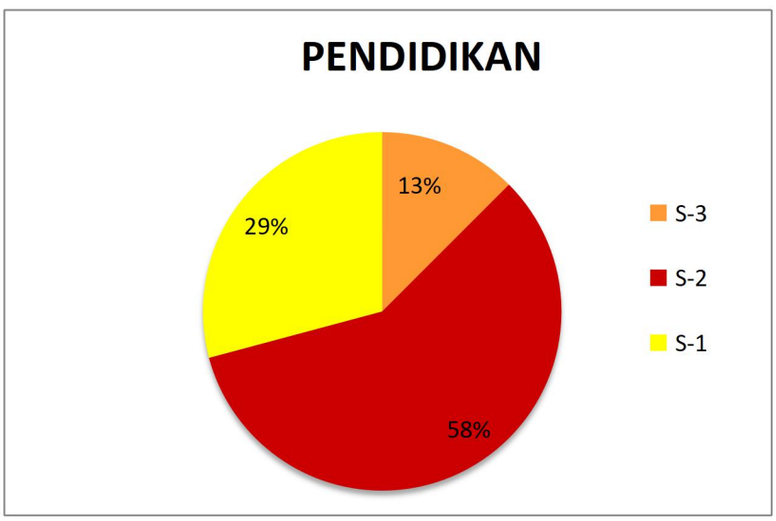

Tabel 1.3.3 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia.

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	9	37 %
2.	41–50	15	63 %

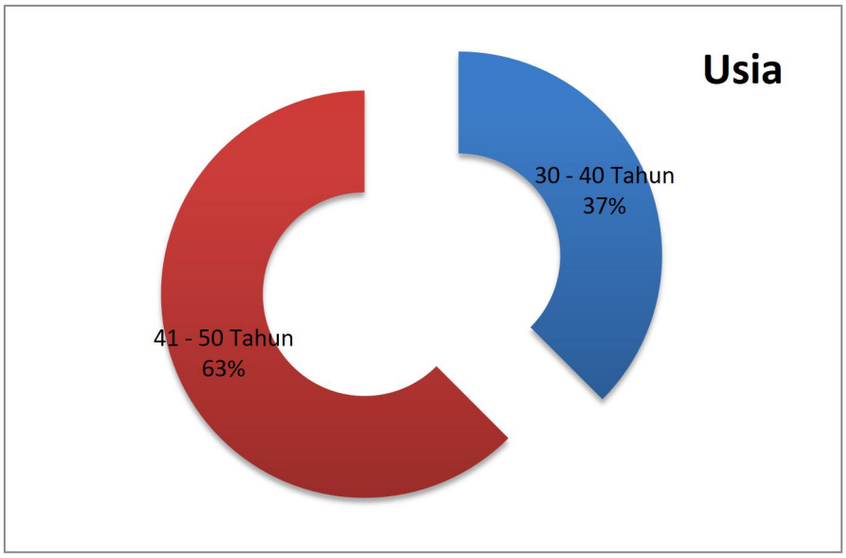

Tabel 1.3.4 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	20	83 %
2.	Wanita	4	17 %

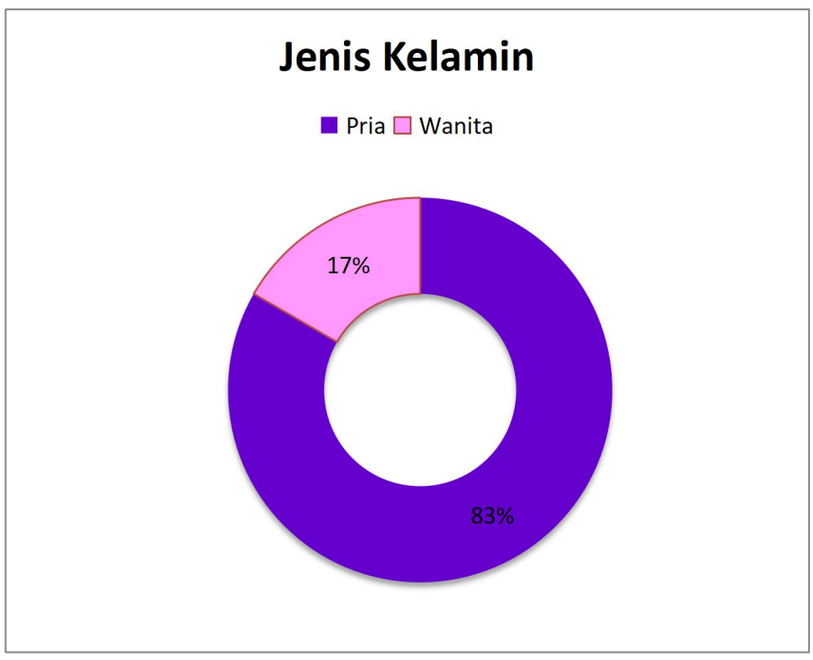

1.4. Auditor

Tabel 1.4.1 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan.

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	3 %
2.	Pembina (IV/a)	6	20 %
3.	Penata Tk. I (III/d)	6	19 %
4.	Penata (III/c)	6	19 %
5.	Penata Muda Tk.I (III/b)	11	36 %
6.	Penata Muda (III/a)	1	3 %

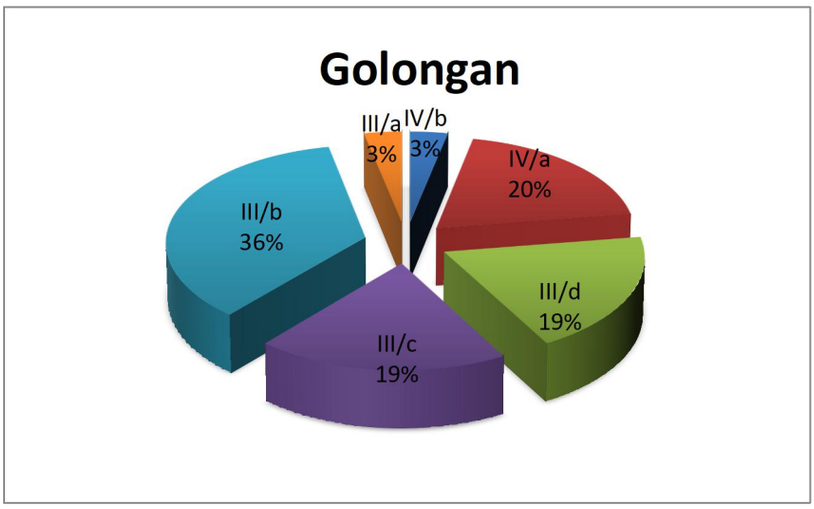

Tabel 1.4.2 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	18	58 %
2.	S1	13	42 %

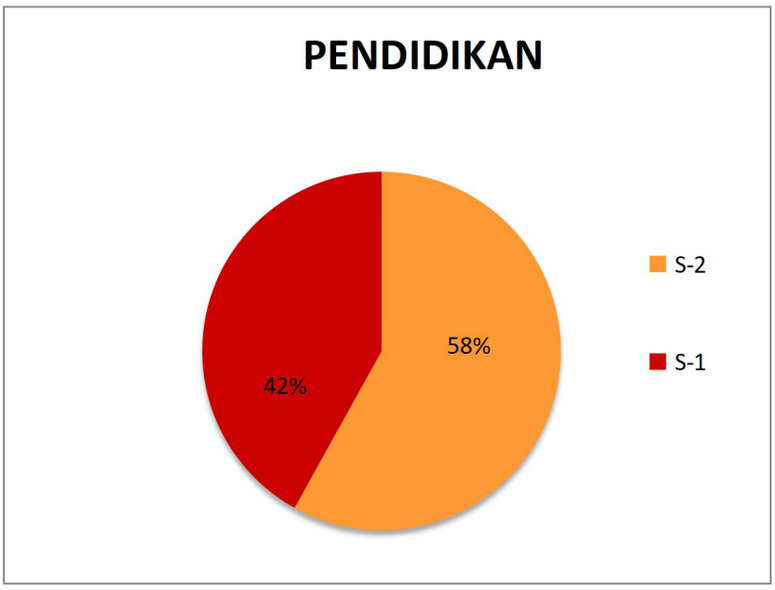

Tabel 1.4.3 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20 –30	3	10 %
2.	31–40	15	48 %
3.	41–50	13	42 %

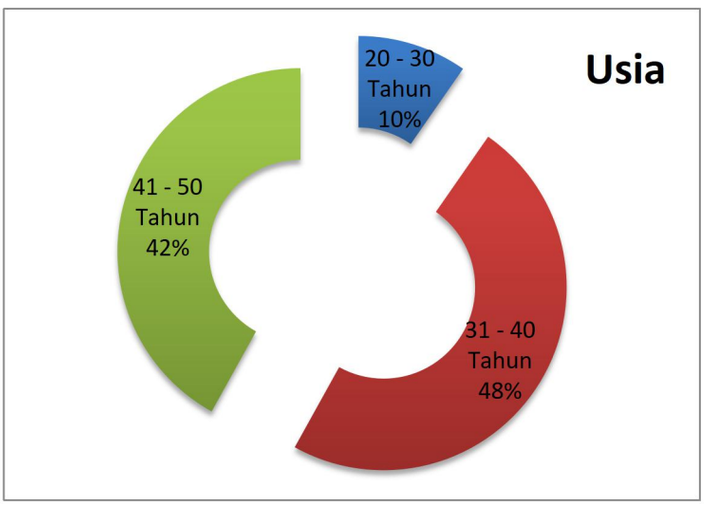

Tabel 1.4.4 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan JenisKelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	25	81%
2.	Wanita	6	19 %

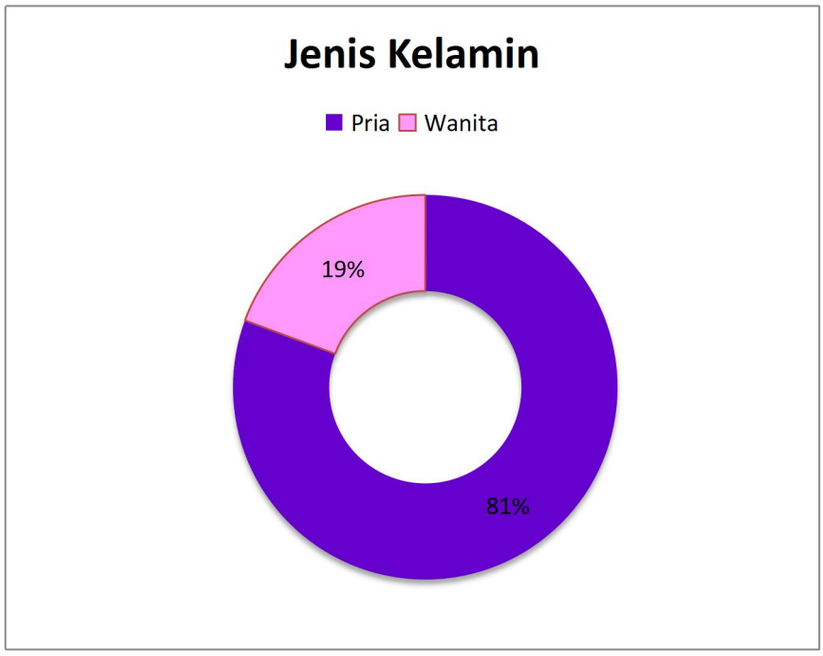

1.5. Auditor Kepegawaian

Tabel 1.5.1 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	11%
2.	Penata Tk. I (III/d)	3	34 %
3.	Penata (III/c)	3	33 %
4.	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	22 %

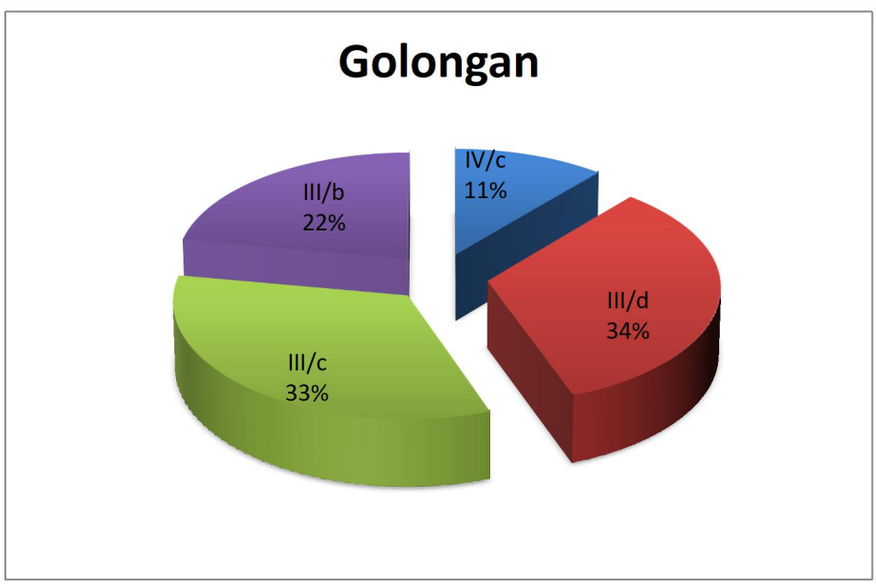

Tabel 1.5.2 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	2	22 %
2.	S1	7	78 %

Tabel 1.5.3 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	5	56 %
2.	41 –50	3	33 %
3.	51 – 60	1	11 %

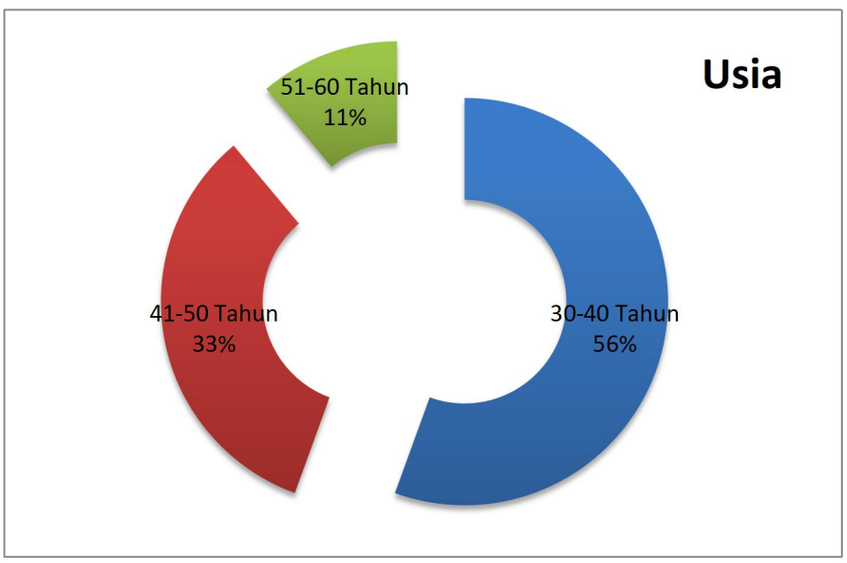

Tabel 1.5.4 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	5	56 %
2.	Wanita	4	44 %

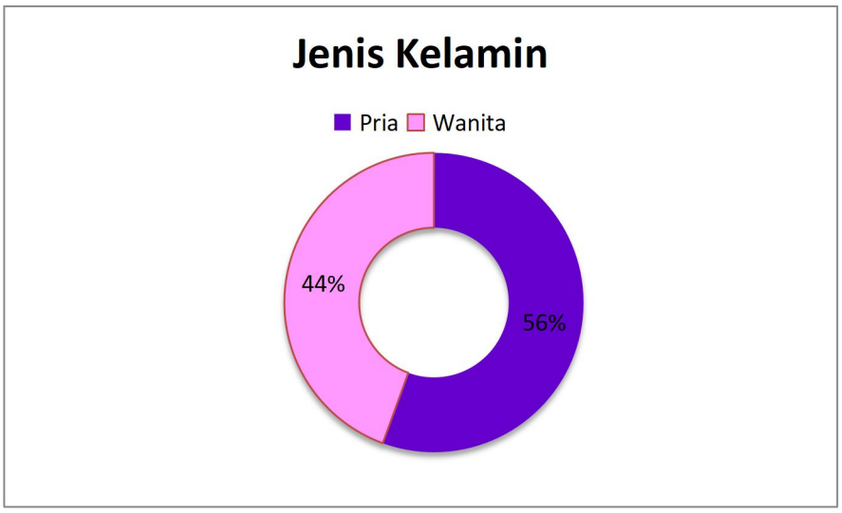

1.6. Pustakawan

Tabel 1.6.1 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina (IV/a)	2	100 %

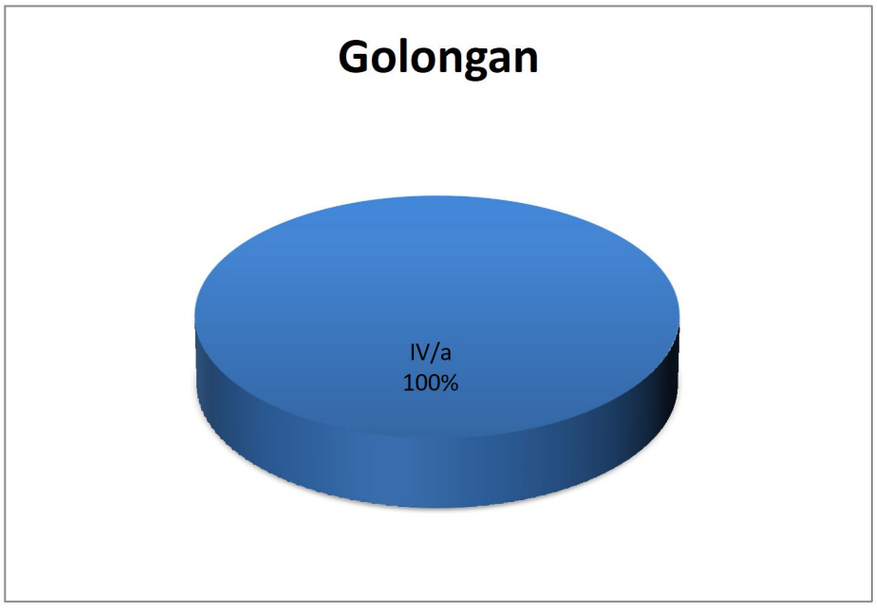

Tabel 1.6.2 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	2	100 %

Tabel 1.6.3 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 60	2	100 %

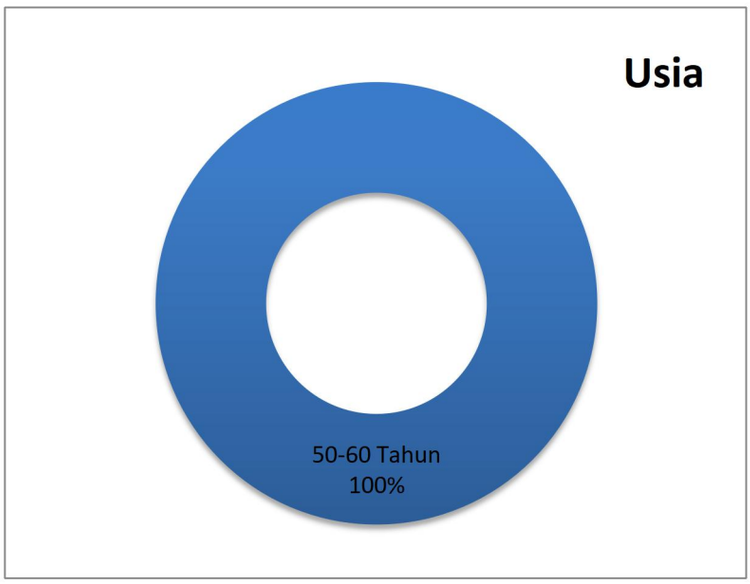

Tabel 1.6.4 Data Pustakawan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	1	50 %
2.	Wanita	1	50 %

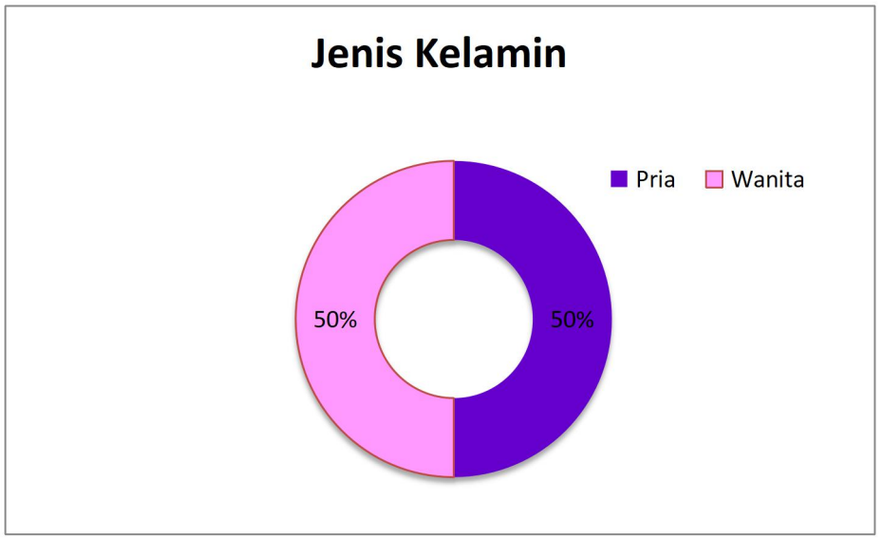

1.7. Pranata Komputer

Tabel 1.7.1 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata (III/c)	1	34 %
2.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	33 %
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	33 %

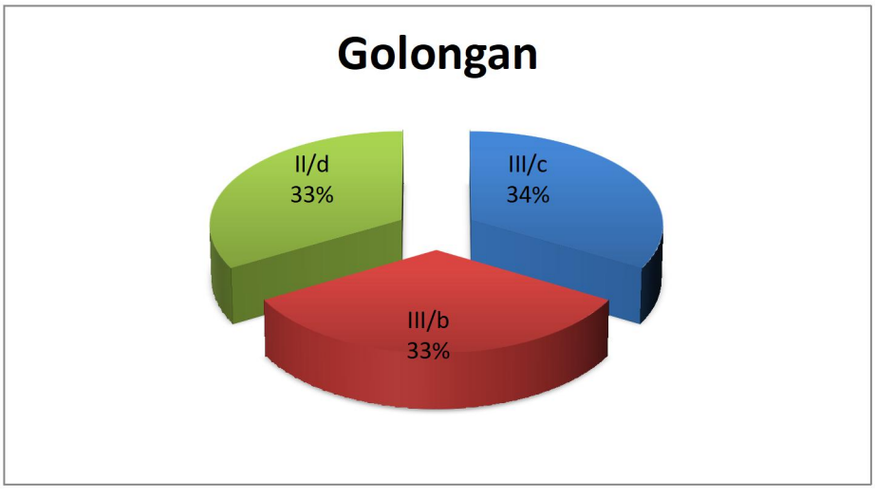

Tabel 1.7.2 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-1	2	67 %
2.	D-3	1	33 %

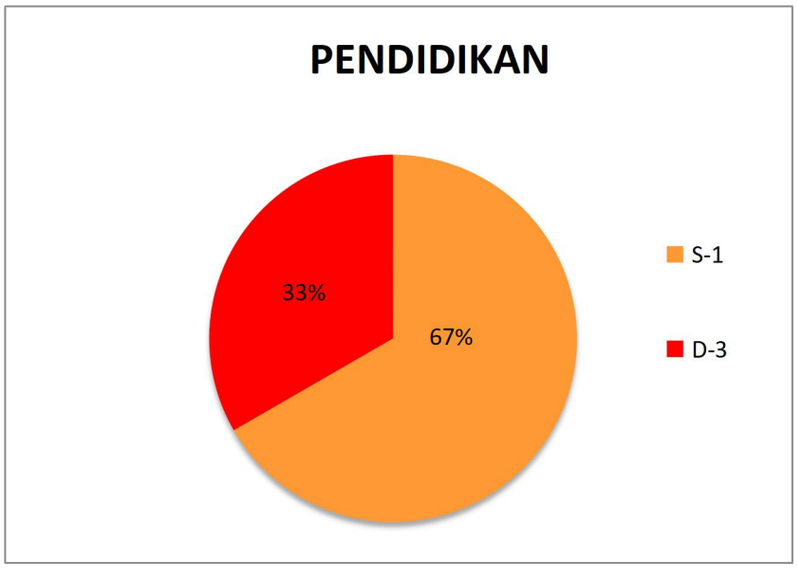

Tabel 1.7.3 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	2	67 %
2.	41 – 50	1	33 %

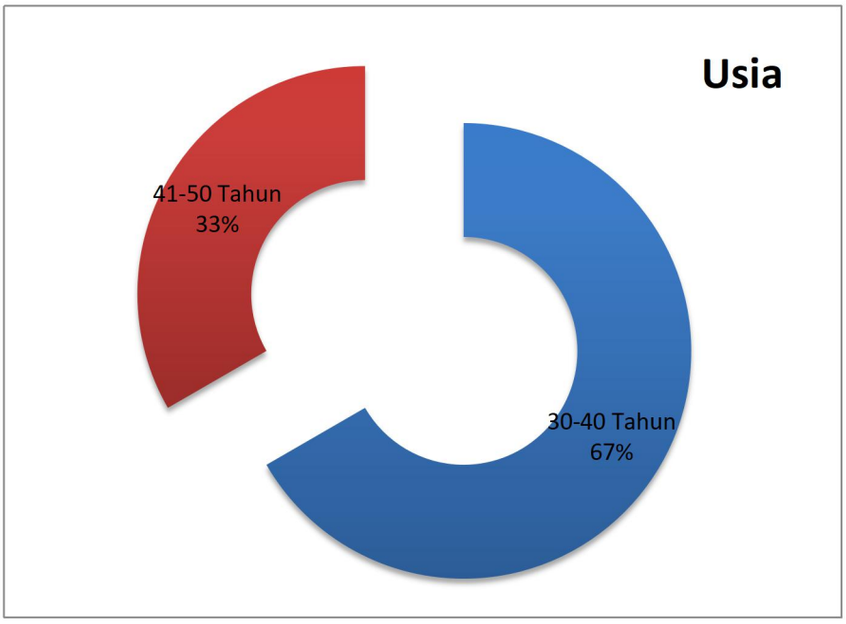

Tabel 1.7.4 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	3	100%
2.	Wanita	0	0 %

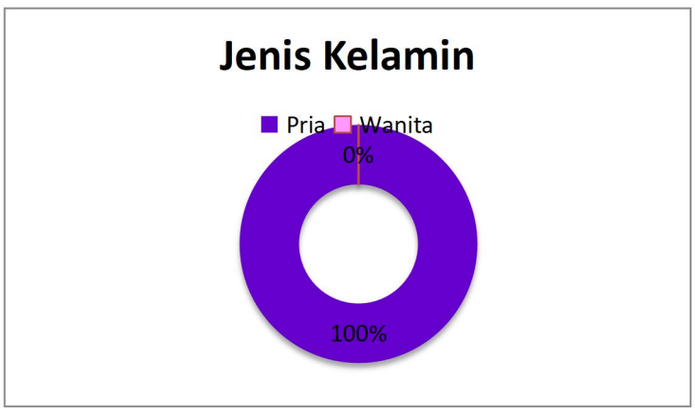

1.8. Analis Kepegawaian

Tabel 1.8.1 Data Analis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Penata (III/c)	1	50 %
2	Penata Muda (III/a)	1	50 %

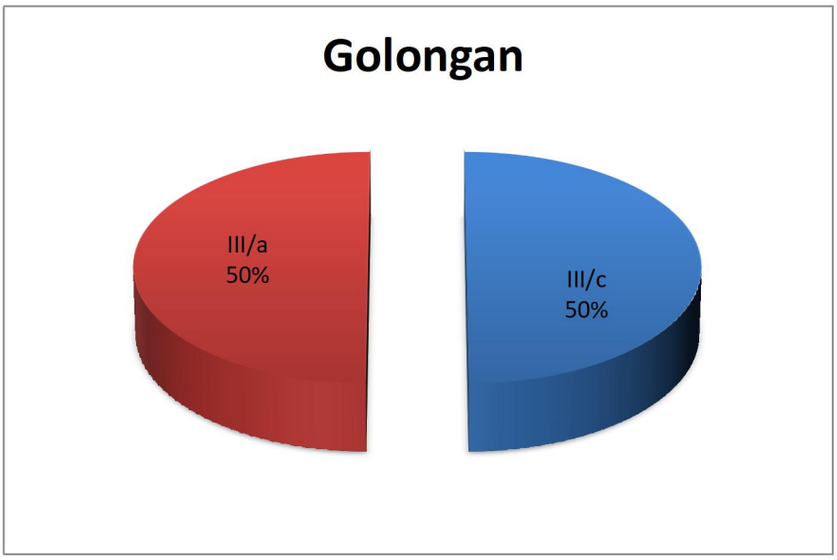

Tabel 1.8.2 Data Analis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	S-1	2	100 %

Tabel 1.8.3 Data Analis Kepegawaian Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	30 – 40	1	50 %
2	41 – 50	1	50 %

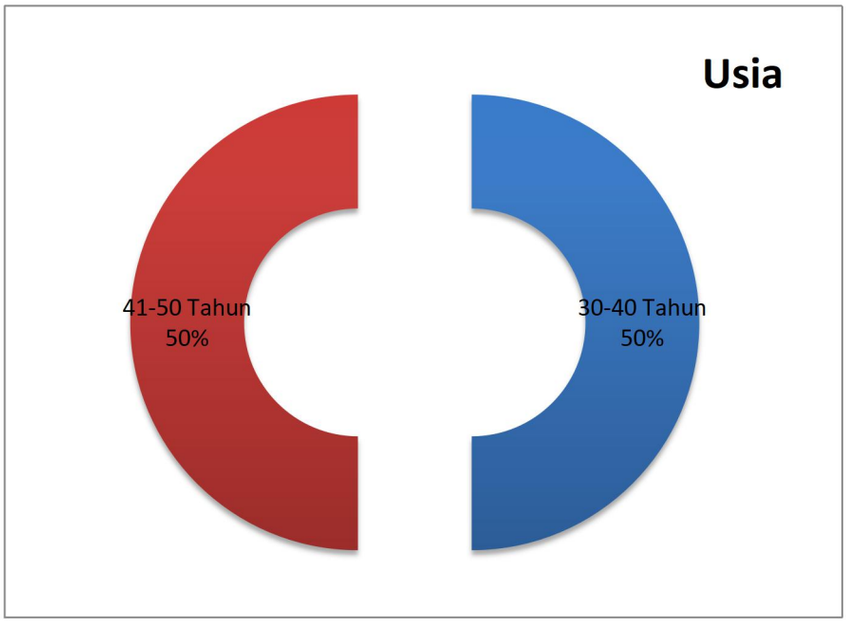

Tabel 1.8.4 Data Analis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	1	50%
2	Wanita	1	50 %

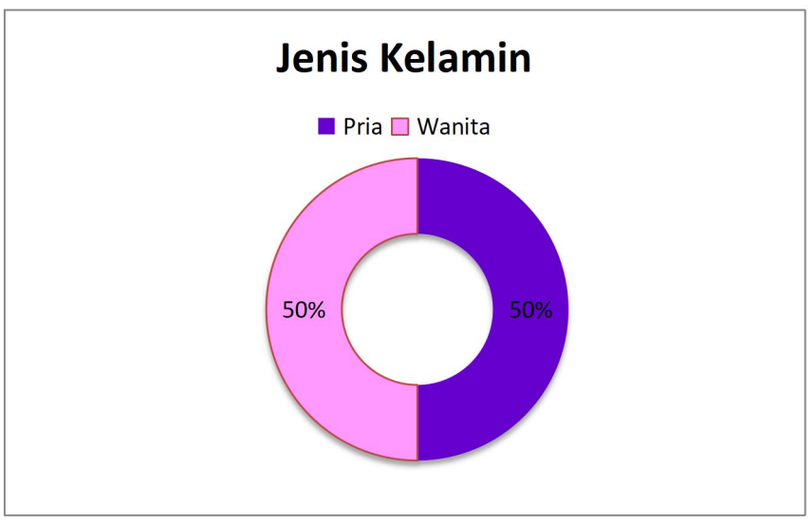

1.9. Analis Arsiparis

Tabel 1.9.1 Data Arsiparis pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	100 %

Tabel 1.9.2 Data Arsiparis pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	1	100 %

Tabel 1.9.3 Data Arsiparis Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	1	100 %

Tabel 1.9.4 Data Arsiparis pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	1	100%
2.	Wanita	0	0 %

1.10. Pelaksana

Tabel 1.10.1 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Tk. I (III/d)	1	5%
2.	Penata (III/c)	2	10%
3.	Penata Muda Tk.I (III/b)	7	35%
4.	Penata Muda (III/a)	10	50 %

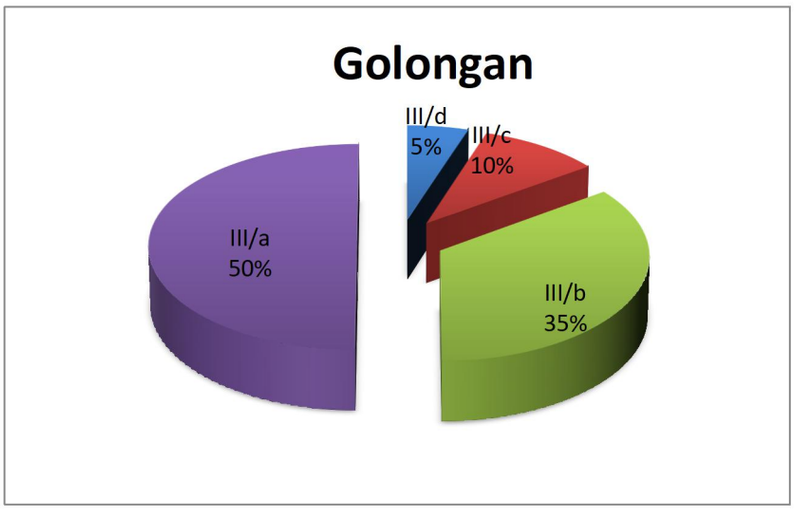

Tabel 1.10.2 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	1	5%
2.	S1	17	85%
3.	SMU	2	10 %

Tabel 1.10.3 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20–30	10	50 %
2.	31 –40	5	25 %
3.	41 – 50	3	15 %
4.	51 – 60	2	10 %

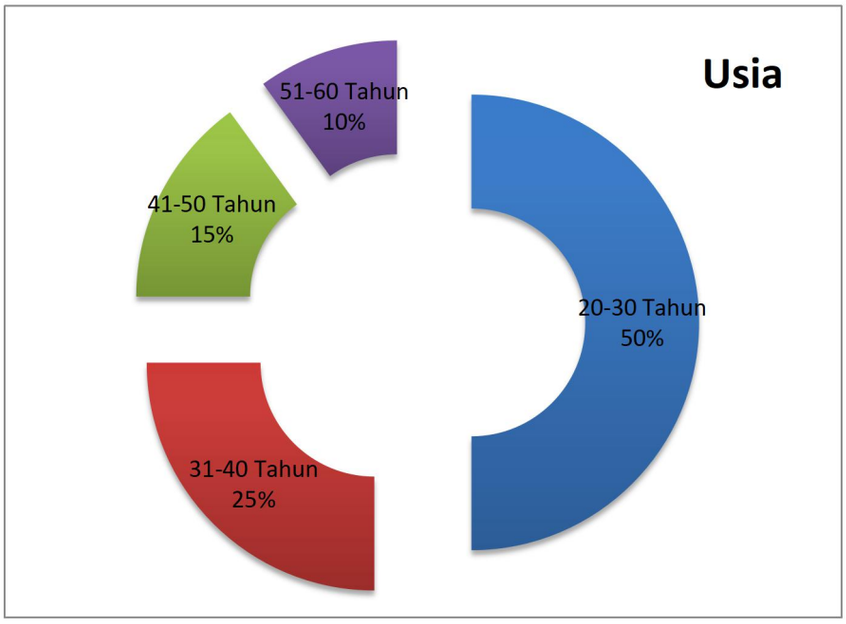

Tabel 1.10.4 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	10	44 %
2.	Wanita	10	56 %

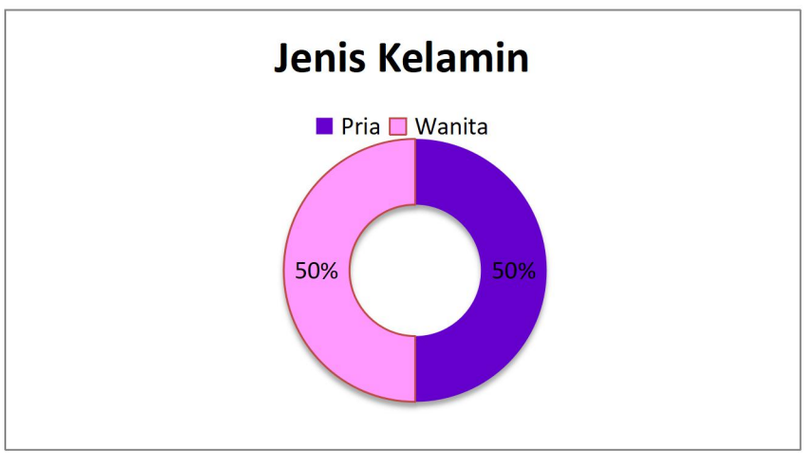

1.1. Honorer

Tabel 1.11.1 Data Honorer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	13	81 %
2	Wanita	3	19 %

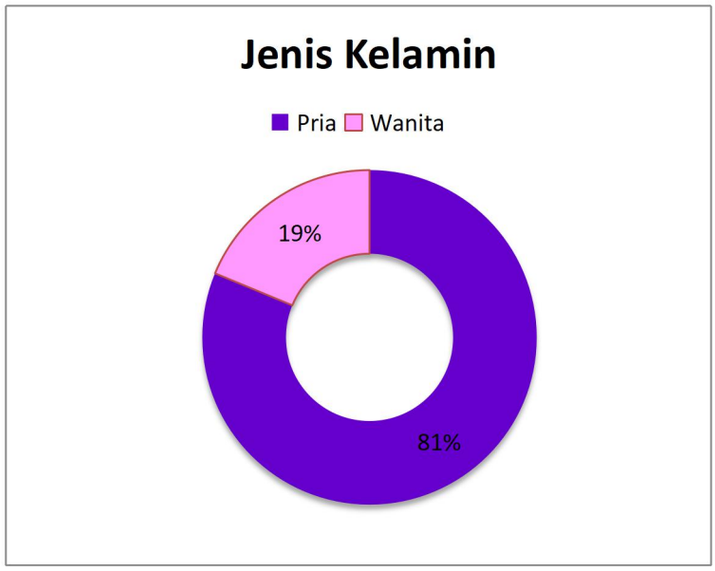

2. Promosi Dan Mutasi Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, M.H.	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda /Hakim Tinggi Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
2.	Aviantara, S.H., M.Hum.	Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan MARI	Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan MARI
3.	Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan MARI	Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan MARI
4.	Sugiyanto, S.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan MARI
5.	Kol. Tuty Kiptiani, S.H., M.H.	Anggota Pokkimmilti Gol. IV Dilmilti II Jakarta/ Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
6	Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H.	Pembina Utama/ Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Pembina Utama/Hakim Tinggi Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
7.	James Butar Butar, S.H., M.Hum.	Pembina Utama /Hakim Utama pada Pengadilan Tinggi Jakarta	Pembina Utama /Hakim Utama Pengadilan Tinggi Palu dipekerjakan untuk tugas Peradilan

			(Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
8.	Muslim, S.H.	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palu	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palu dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
9.	Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Pekanbaru dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
10.	Ny. Udjianti, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palangkaraya	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palangkaraya dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
11.	Isnurul Syamsul Arif, S.H.,, M.Hum.	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI
12.	Boy Mirwadi, S.H.	Pembina Utama /Hakim Utama Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pembina Utama /Hakim Utama, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MARI
13.	A. Syaifullah, S.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Utama/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
14.	H. Iswan Herwin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Utama/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

15.	Simbar Kristianto, S.H.	Pembina Utama /Hakim Utama, Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Pembina Utama /Hakim Utama, Hakim Tinggi Yustisal pada Mahkamah Agung RI sebagai Panitera Muda Tata Usaha Negara
16.	Agus Subroto, S.H., M.Hum.	Pembina Utama /Hakim Utama Pengadilan Tinggi Jakarta dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI	Pembina Utama /Hakim Utama Pengadilan Tinggi Palu dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI sebagai Panitera Muda Perdata Khusus
17.	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.	Kepala Badan Pengawasan MARI	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
18.	Jupriyadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Agung Mahkamah Agung RI

3. Promosi Dan Mutasi Jabatan Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.	Hakim Madya Muda/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Madya Muda/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali
2.	Harika Nova Yeri, S.H., M.H.	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Panitera Pengganti Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
3.	Mohamad Syauqie, S.H., M.H	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan	Hakim Madya Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

		MARI	
4.	Mayor. Sus. Jonarku, S.H., M.H.	Angpokkimmil Gol V Dilmil II-08 Jakarta/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Kepala Dilmil III-17 Manado
5.	Gayuh Rahantyo, S.H.	Hakim Pratama Madya/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
6.	Dr. H. Ahmad Syafiq, S.H., S.Ag., MH.	Hakim Madya Muda/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Madya Muda/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok
7.	Arief Budiman, Lc., MA.Hk.	Hakim Pratama Madya/ pada pada Pengadilan Agama Dabo Singkep	Hakim Pratama Madya/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
8.	Fathur Rizqi, S.H.I.	Hakim Pratama Madya/ pada pada Pengadilan Agama Sawahlunto	Hakim Pratama Madya/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
9.	Morindra Kresna, S.H.	Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Jember	Hakim Madya Pratama / Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
10.	Koko Riyanto, SH., MH.	Hakim Madya Pratama /Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha	Hakim Madya Pratama / Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
11.	Ramon Wahyudi, S.H., M.H.	Hakim Madya Pratama/ Pengadilan Negeri Depok	Hakim Madya Pratama / Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
12.	Widayatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda/ Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Madya Muda/ Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI

13.	Bayuardi, S.H., M.H.	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI

4. Promosi dan Mutasi Fungsional Tertentu Menjadi Pejabat Struktural Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Sutrisno, S.H.I	Auditor Kepegawaian Muda pada Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawasan
2.	Rama Rahim, S.E., M.M., M.B.A.	Auditor Muda pada Badan Pengawasan	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA
3.	Amarilldo Rizkia, S.Psi.	Auditor Muda pada Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorai Wilayah II Badan Pengawasan

5. Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Wiwi Ismiyati, SH., MH.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah II	Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengawasan
2.	Dwi Era Wahyuni, S.Psi., M.M.	Analis Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah I	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah I
3.	Mariana Erka Puteri, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Akuntansi Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Badan Pengawasan
4.	Mochtar Luthfi, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah IV	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Badan Pengawasan
5.	Nuzliana Abda, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah I	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah IV

6.	Muhammad Ulul Ilmi, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Akuntansi Sekretariat Badan Pengawasan

6. Promosi Dan Mutasi Pelaksana Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Renatha Arini, S.E.	Analis SDM Aparatur pada Pengadilan Agama Batam	Analis SDM Aparatur pada Badan Pengawasan
2.	Sukriadi Tanjung, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Penajam	Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengawasan
3.	Novan Pujimahaputra, S.Kom.	Penyusun Laporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Sumbawa besar	Analis Apilkasi dan pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Badan Pengawasan MA RI
4.	Arga Kurniawan, S.H.	Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Ende	Analis Tata Usaha pada Pengawasan MA RI
5.	Nur Prista Alshabira, S.Psi.	Analis SDM Aparatur pada Pengadilan Negeri Sumedang	Analis Tata Usaha pada Pengawasan MA RI

7. Promosi Pejabat Stuktural Dan Pelaksana Menjadi Fungsional Tertentu Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Sri Kamala Dewi, SH., MH	Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Madya pada Badan Pengawasan MARI
2.	Abu Samah, SE., Ak. MM.	Analis Pengembangan SDM pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI
3.	Mulia Karyadi, ST., MM.	Analis Pengembangan SDM pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI
4.	Yanalia Nurmawati, S.E., S.H., M.Ak.	Analis Aset Negara pada Sekretariat Badan Pengawasan	Auditor Muda pada Badan Pengawasan MARI

		MARI	
5.	Narti Sri Sugiarti, SE	Penyusun Rencana Mutasi pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Analis Kepegawaian Muda pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI
6.	Ridwan AR, SKomp.	Analis Tata Usaha pada Inspektorat Wilaya II Badan Pengawasan MARI	Analis Kepegawaian Pertama pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI
7.	Agustaja Tiyusandy, Amd.Kom.	Pengelola Data pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI	Pranata Komputer Terampil pada Sekretariat Badan Pengawasan MARI

8. Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Dwi Febri Yandi	Auditor Ahli Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Ahli Muda pada Badan Pengawasan MARI
2.	Syarifullah M Nur	Auditor Ahli Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Ahli Muda pada Badan Pengawasan MARI
3.	Sahreza Harahap	Auditor Ahli Pertama pada Badan Pengawasan MARI	Auditor Ahli Muda pada Badan Pengawasan MARI

9. Mutasi Kepangkatan Hakim Tinggi Pengawasan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.	T.M.T	PANGKA/ GOL.	T.M.T
1.	Susilowati, SH., MH.	IV/c	1-04-2017	IV/d	1-04-2021

10. Mutasi Kepangkatan Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangkat/ Gol	T.M.T
1.	Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.	IV/a	1-4-2017	IV/b	1-4-2021
2.	Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.	IV/a	1-4-2017	IV/b	1-4-2021
3.	Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.	IV/a	1-4-2017	IV/b	1-4-2021
4.	Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.	III/d	1-4-2017	IV/a	1-4-2021
5.	Arif Budiman, Lc., MA.Hk.	III/c	1-10-2017	III/d	1 – 10 – 2021

11. Mutasi Kepangkatan Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu dan Pelaksana Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangkat/ Gol	T.M.T
1.	Wiwi Ismiyati, S.H., M.H.	IV/a	01–10–2012	IV/b	01 - 04 - 2021
2.	Yusuf, SE., Ak. CA., MAk.	III/d	01 – 04 – 2019	IV/a	01 - 04 – 2021
3.	Sri Widayanti, SH., MM.	III/c	01 – 04 – 2017	III/d	01 - 04 – 2021
4.	Dwi Wulan Indriyani, S.Psi.	III/c	01 – 04 – 2017	III/d	01 - 04 – 2021
5.	Dwi Era Wahyuni, S.Psi., MM.	III/c	01 – 04 – 2017	III/d	01 - 04 – 2021
6.	Zelfikri Oktiva Lubis, ST.	III/c	01 – 04 – 2017	III/d	01 –04 – 2021
7.	Sutikno, S.Kom.	III/c	01 – 04 – 2017	III/d	01 - 04 – 2021
8.	Ferri Taufik Ferdiansyah, SE. Ak. CA. M.Ak. C.Fra	IV/a	01 – 10 – 2019	IV/b	01 - 10 – 2021
9.	Nurdiansyah, SH., MM.	III/c	01 – 04 – 2018	III/d	01 - 10 – 2021
10.	Syarifullah M. Nur, S.Kom.	III/b	01 – 10 – 2019	III/c	01 - 10 – 2021
11.	Dwi Febri Yandi, SE., MS.Ak.	III/b	01 – 04 – 2019	III/c	01 - 10 – 2021
12.	Hendra Rahmadani, SKom., MM.	III/c	01 – 10 – 2018	III/d	01 -10 – 2021

12. Hakim Yustisial Yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Dr. H. Ahmad Syahrus Sikti, S.H.I., M.H.	10 Tahun	01-01-2021
2.	Averroes, S.H.	10 Tahun	01-01-2021
3.	Anik Istirochah, S.H., M.Hum.	20 Tahun	01-12-2021
4.	Abdul Affandi, S.H.	18 Tahun	01-12-2021
5.	H. Sunoto, S.H., M.Kn.	18 Tahun	01-12-2021
6.	Horasman Boris Ivan, S.H.	18 Tahun	01-12-2021

7.	Dr. Supandriyo, S.H., M.H.	18 Tahun	01-12-2021
8.	Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li.	18 Tahun	01-12-2021
9.	Koko Riyanto, S.H., M.H.	18 Tahun	01-12-2021

13. Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Nur Susana Tifa, S.E.	10 Tahun	01-01-2021
2.	Muhammad Huzaifah, S.Kom.	10 Tahun	01-01-2021
3.	Virna Prasamia Nugraha, S.E.	10 Tahun	01-01-2021
4.	Amarilldo Rizkia, S.Psi.	10 Tahun	01-01-2021
5.	Rachma Kurniati, S.Psi.	10 Tahun	01-01-2021
6.	Devi Pradifta Army, S.H.	10 Tahun	01-01-2021
7.	Zullvan Sugiantoro	10 Tahun	01-01-2021
8.	IGLN Sidemen Putra, S.E.	16 Tahun	01-02-2021
9.	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.	28 Tahun	01-03-2021
10.	Sri Kamala Dewi, S.H., M.H.	30 Tahun	01-03-2021
11.	Dra. Any Dyah Wijayanti	30 Tahun	01-03-2021
12.	R. Lucky Permana, S.H.	30 Tahun	01-03-2021
13.	Narti Sri Sugiarti, S.E.	10 Tahun	01-03-2021
14.	Arief Purwoko, S.Kom.	6 Tahun	01-03-2021
15.	Tagor Bagus Suprobo, S.H.	6 Tahun	01-03-2021
16.	Rezky Azhari, S.Psi.	6 Tahun	01-03-2021
17.	Syarifullah M. Nur, S.Kom.	6 Tahun	01-03-2021
18.	Dwi Febri Yandi, S.E., M.S.Ak	6 Tahun	01-03-2021

19.	Sanda Fajelius Hasibuan, S.H.	6 Tahun	01-03-2021
20.	Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi.	6 Tahun	01-03-2021
21.	Rizky Setyo Pambudi, S.Kom.	6 Tahun	01-03-2021
22.	Davis Rozano Besthari, S.Si.	6 Tahun	01-03-2021
23.	Suriyanto, S.H.	6 Tahun	01-03-2021
24.	Dewi Putri Noviandari, S.Kom.	6 Tahun	01-03-2021
25.	Yuan Cynthia Boru Simanjuntak, S.P.	6 Tahun	01-03-2021
26.	Ridwan AR., S.Komp.	4 Tahun	01-03-2021
27.	Riswan Marhaen Renuat, S.Kom.	4 Tahun	01-03-2021
28.	Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom.	7 Tahun	01-03-2021
29.	Lety Puspitosari, S.E., Ak., M.M.	12 Tahun	01-04-2021
30.	Muhammad Adzkiya, S.E., M.Acc., CA.	12 Tahun	01-04-2021
31.	Hendra Rahmadani, S.Kom., M.M.	12 Tahun	01-04-2021
32.	Apriyadi Romian Kardono, S.E., Akt., M.Ak., CA.	12 Tahun	01-04-2021
33.	Hendra Basry, S.E., M.Ak.	12 Tahun	01-04-2021
34.	Musa La Haji, S.H.I.	14 Tahun	01-04-2021
35.	Faizal Amir, S.H.	12 Tahun	01-04-2021
36.	Sutrisno, S.H.I.	10 Tahun	01-04-2021
37.	Recky Roger Koraag, S.H.	10 Tahun	01-04-2021
38.	Yugus Dwi Prasetyo, S.E.	12 Tahun	01-04-2021
39.	Jhon Richo, S.Psi., M.M.	12 Tahun	01-04-2021
40.	Yanalia Nurmawati, S.E., M.Ak	12 Tahun	01-04-2021
41.	Rizki Rantaperkasa, S.H.	10 Tahun	01-04-2021
42.	Dra. Yekti Handayani, S.H., M.Si.	28 Tahun	01-10-2021
43.	Wiwi Ismiyati, S.H., M.H.	26 Tahun	01-10-2021
44.	Mariana Erka Puteri, S.H., M.H.	12 Tahun	01-10-2021

45.	Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H.	12 Tahun	01-12-2021
46.	Jufri Hardi, S.T., M.H.	12 Tahun	01-12-2021
47.	Imawan Suprapto, S.E.	12 Tahun	01-12-2021
48.	Dewi Nurqolbi Triastuti, S.Psi., M.H.	12 Tahun	01-12-2021
49.	Muhammad Ulul Ilmi, S.E.	12 Tahun	01-12-2021
50.	Sahreza Harahap, S.E., S.H., Ak., M.Ak., C.P.A	10 Tahun	01-12-2021

14. Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat Struktural Dan Fungsional Tertentu Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Yang Memasuki Purnabakti/ Pensiun

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1.	Drs. H. Muhammad, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-05-2021
2.	Makmum Masduki, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-06-2021
3.	Baharudin Siagian, SH., MHum.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-07-2021
4.	Yohanes De Britto Gunadi, SH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-10-2021
5.	Kolenel (CHK) Tatang Nasifit, S.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-11-2021

15. Penghargaan Satya Lancana 30 Tahun, 20 Tahun Dan 10 Tahun Yang Diperoleh Oleh Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Dan Pelaksana Pada Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO	NAMA	JABATAN	SATYA LANCANA
1.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	30 Tahun
2.	Wiwi Ismiyati, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum	30 Tahun
3.	Dra. Yekti Handayani, S.H., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah III	30 Tahun
4.	Nuzliana Abda, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah	30 Tahun

		IV	
5.	Desiyanto	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	30 Tahun
6.	Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	20 Tahun
7.	Dr. H. Ahmad Syahrus Sikti, S.H.I., M.H.	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
8.	Averroes, S.H.	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	10 Tahun
9.	Devi Pradifta Army, S.H.	Auditor Kepegawaian Muda	10 Tahun
10.	Rachma Kurniati, S.Psi.	Analis Tata Usaha	10 Tahun
11.	Yanalia Nurmawati, SE., SH., MAk.	Auditor Muda	10 Tahun
12.	Imawan Suprapto, S.E.	Pelaksana	10 Tahun
13.	Amarilldo Rizkia, S.Psi.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Irwil II	10 Tahun
14.	Virna Prasamia Nugraha, S.E., S.Pd.	Auditor Muda	10 Tahun
15.	Zullvan Sugiantoro, S.T.	Pranata Komputer Muda	10 Tahun
16.	Muhammad Huzaifah, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama	10 Tahun
17.	Nursusana Tifa, S.E.	Auditor Kepegawaian Muda	10 Tahun
18.	Dewi Nurqolbi Triastuti, S.Psi., MH.	Kepala Sub Bagian Kelembagaaan dan Pelaporan	10 Tahun
19.	Mawardi	Pelaksana	10 Tahun
20.	Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.	Hakim Yustisial	16 Tahun
21.	Endang Lestari, S.H., M.Kn.	Hakim Yustisial	16 Tahun
22.	Anisah Shofiawati, S.H.	Hakim Yustisial	16 Tahun
23.	Dr. Supandriyo, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	16 Tahun
24.	Ade Suherman, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	16 Tahun
25.	Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	16 Tahun
26.	Edi Gustiawan, S.H., M.M.	Auditor Kepegawaian Muda	16 Tahun

27.	IGLN Sidemen Putra, S.E.	Kasubbag Perlengkapan	16 Tahun
28.	Abdul Affandi, S.H.		16 Tahun
29.	Andi Maderumpu, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	16 Tahun
30.	Mario Parakas, S.H., M.H.	Hakim Yustisial	16 Tahun
31.	Dr. H. Ahmad Syafiq	Hakim Yustisial	16 Tahun
32.	Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li.	Hakim Yustisial	16 Tahun
33.	H. Sunoto, S.H., M.Kn.	Hakim Yustisial	16 Tahun
34.	Horasman Boris Ivan, S.H.	Hakim Yustisial	16 Tahun

16. SDM Pejabat/Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pustakawan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Arsiparis, Pejabat Struktural Serta Fungsional Umum Yang Mengikuti Diklat, Bimtek Dan Sosialisasi

No	Nama Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Tujuan
1.	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	3	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
2.	Pelatihan Dasar CPNS	5	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
3.	Pelatihan "reforming the indonesian criminal procedure law; estabilishing a legal framework on personal data proction In criminal investigation	1	Kemenkominfo	Peningkatan Kompetensi SDM
4.	Pelatihan Online Arsip Elektronik	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
5.	Bimtek Pemaparan Proposal Penelitian	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
6.	Pelatihan Online English Effective Presentation	6	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
7.	Pelatihan Sertifikasi Niaga	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi

	Kepailitan dan PKPU			SDM
8.	Sosialisasi dan Pengarahan Teknis Kegiatan e-SPI	5	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme	2	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
10.	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	9	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
11.	Pelatihan Sertifikasi Niaga bidang HKI	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
12.	Pelatihan Online Manajemen Aset	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
13.	Pelatihan Audit Forensik Organisasi	30	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
14.	Pelatihan Online Kepemimpinan Administrator (PKA)	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
15.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
16.	Pelatihan Manajemen ASN	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
17.	Diklat JF Auditor Pertama	2	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
18.	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	1	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
19.	Pelatihan Audit Investigatif	5	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
20.	Pelatihan Training of Trainer Reguler	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
21.	Pelatihan Training of Trainer Mediasi	1	Pusdiklat MA	
22.	Pelatihan Advanced Kepailitan	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2021 dikelompokkan :

- 2156 unit peralatan dan mesin Rp. 15.013.359.452
- 2.290 buah aset tetap lainnya Rp. 535.403.685
- 12 unit aset tak berwujud Rp. 3.254.333.180

Total pengelolaan sarana dan prasarana Rp. 18.803.096.317

Grafik 3.1 Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan

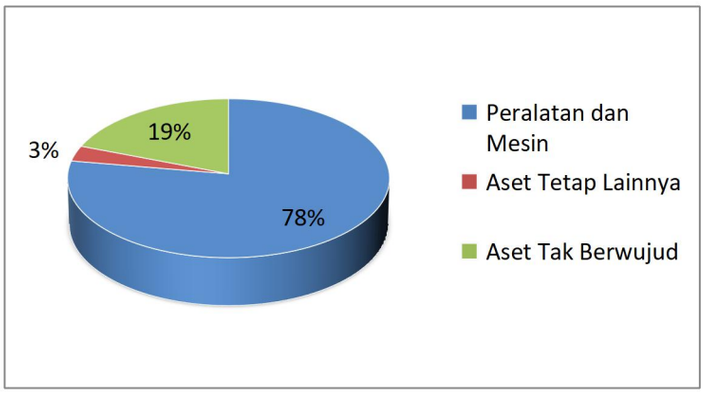

Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada :

a) Perolehan Sarana dan Prasarana

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan DIPA tahun 2021 :

1) Pembelian

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2021 adalah 57 Unit dengan Total Rp **371.892.300** (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	P.C Unit	11	110.032.500
2.	Televisi	5	39.995.000
3.	Dispenser	2	4.800.000
4.	Printer	10	25.115.000
5.	Peralatan Fitness	3	22.098.000
6.	Laptop	21	290.950.000
7.	Camera Conference	1	97.500.000
8.	CCTV	2	20.125.000
9.	Papan Visual	1	17.650.000
10.	Lemari Es	1	5.481.800
	TOTAL	**57**	**371.892.300**

b) Pemeliharaan

Sarana dan prasarana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sebagian besar hasil Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari DIPA Badan Pengawasan sendiri. Badan Pengawasan memiliki 2156 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

1) Pemeliharaan Inventaris Kantor

   Pemeliharaan dan perawatan telah dilakukan terhadap P. C Unit, Printer, Laptop dan Televisi

2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas

   Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas pada Badan Pengawasan tahun 2021 telah dilakukan pada 4 unit station wagon. Dimana kendaraan dinas tersebut melekat ke jabatan masing-masing pejabat eselon 3.

   Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Pengisian BBM, Penggantian sparepart, Service AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, spooring & Balancing dan Pergantian ban.

3) Pemeliharaan Kendaraan Operasional

   Untuk menunjang operasional perkantoran, disediakan 10 unit station wagon, 1 unit Micro Bus dan 4 unit sepeda motor.

   Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas tersebut antara lain : Perpanjangan STNK, Pengisian BBM, Penggantian sparepart, Servise AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, spooring & Balancing dan Pergantian ban.

c) Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Badan Pengawasan per 30 Desember 2021 sebesar Rp 194.888.943 (*seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapa puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari:

- saldo awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp 198.379.745 *(seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)*
- total pembelian persediaan selama Tahun 2021 (sampai dengan bulan september) sebesar Rp 495.574.400 (*empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)*
- total distribusi sebesar Rp 297.194. 655 *(dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)*

Berdasarkan data diatas, Posisi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI T.A 2021 dapat terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2 Pengelola Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara

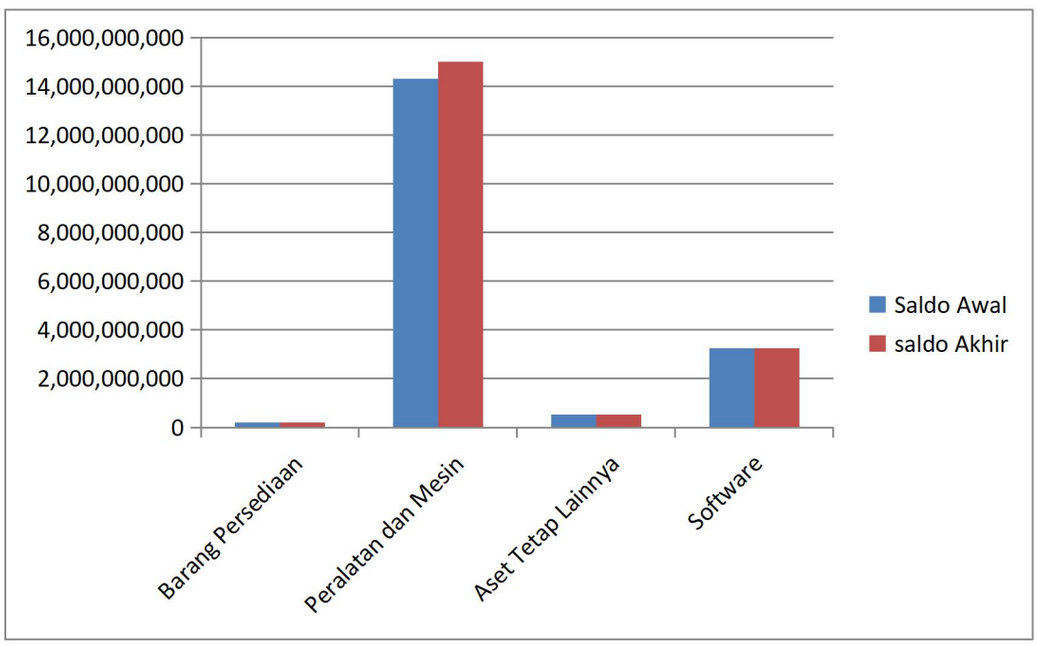

HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2021

Tujuan dari dilakukannya Opname Fisik Barang Persediaan untuk memastikan kesamaan antara data di Aplikasi Persediaan dengan jumlah barang yang riil,yang rinciannya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang				Kondisi Barang	
			Menurut Laporan		Hasil cek Fisik		Baik	Usang
		11511						
	ALAT TULIS	**1E+09**						
1	Bolpoint Faster	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
2	Pulpen Gel (Uniball)	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
3	Pensil 2B	000003	29	Buah	29	Buah	Baik	-
4	Spidol Marker Biru	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
5	Stabillo Boss (warna Warni)	000005	16	Buah	16	Buah	Baik	-
6	Spidol Whiteboard	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
7	Pulpen Faster Tutup (C600)	000007	64	Buah	64	Buah	Baik	-
8	Buku Ekpedisi	000008	15	Buku	15	Buku	Baik	-
9	Spidol Kecil Warna Warni	000009	2	Buah	2	Buah	Baik	-
10	Snowman V3 Ballpoint	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
11	Unibal Boxy	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
12	Ordner Gungyu 401	000012	11	Buah	11	Buah	Baik	-
13	Ordner Gungyu 403	000013	21	Buah	21	Buah	Baik	-
14	Ball Poin Signa	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
15	Pulpen Kenko	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
16	Pulpen Joyko Gel warna biru	000016	11	Buah	11	Buah	Baik	-
17	Pulpen Joyko Gel warna hitam	000017	90	Buah	90	Buah	Baik	-
18	Baterai ABC besar	000018	0	Set	0	Set	-	-
19	Ballpoin Baliner	000019	45	Buah	45	Buah	Baik	-
20	Pulpen Unibal Gelimpact	000020	40	Buah	40	Buah	Baik	-
21	Map merah Logo	000021	1229	Lembar	1229	Lembar	Baik	-
22	Map kuning Logo	000022	###	Lembar	1307	Lembar	Baik	-
23	Map hijau Logo	000023	1.359	Lembar	1359	Lembar	Baik	-
24	Map biru logo	000024	1496	Lembar	1496	Lembar	Baik	-
25	Map orange logo	000025	580	Lembar	580	Lembar	Baik	-
26	Pensil HB	000026	27	Buah	27	Buah	Baik	-
27	Pulpen Kenko Gel Hitam	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
28	Ballpoint C8 Faster	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
29	Pensil mekanik rotring	000029	8	Buah	8	Buah	Baik	-
30	Isi pensil rotring 0,5	000030	29	Pad	29	Pad	Baik	-
31	Joyko pen stand	000031	5	Buah	5	Buah	Baik	-
32	Ballpoint Promosi	000032	0	Buah	0	Buah	-	-
33	Pulpen faster F6	000033	0	Buah	0	Buah	-	-
34	Pulpen faster EC 8	000034	0	Buah	0	Buah	-	-
35	Pulpen Scotch Magic	000035	0	Buah	0	Buah	-	-
36	Ballpoint faster C6	000036	53	Buah	53	Buah	Baik	-
37	Pulpen Hero 956	000037	0	Buah	0	Buah	-	-
38	Spidol Permanen	000038	3	Buah	3	Buah	Baik	-
39	Pulpen 4 warna	000039	33	Buah	33	Buah	Baik	-
40	Pulpen pantel pelantikan	000040	0	Buah	0	Buah	-	-
41	Snowman V5 hitam	000041	34	Buah	34	Buah	Baik	-
42	Pulpen penghapus	000042	6	Buah	6	Buah	Baik	
43	Ballpoint pentel RS3 Original	000043	10	Buah	10	Buah	Baik	
44	Spidol Kecil Biru	000044	9	Buah	9	Buah	Baik	
45	Spidol Kecil Hitam	000045	26	Buah	26	Buah	Baik	-
	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL	**1E+09**						
46	Stempel Perma	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
47	Stempel Colop	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
48	Tinta Colop	000004	9	Buah	9	Buah	Baik	-
49	Tinta Hero	000005	0	Botol	0	Botol	-	-
50	Isi pulpen pantel	000006	0	Botol	0	Botol	-	-
	PENJEPIT KERTAS	**1E+09**						
51	Paper Clips	000001	0	Kotak	0	Kotak	-	-
52	Binder Clips 107	000002	102	Kotak	102	Kotak	Baik	-
53	Binder Clips 155	000003	31	Kotak	31	Kotak	Baik	-
54	Klip	000004	0	Kotak	0	Kotak	-	-
55	Binder Clip 111	000005	98	Kotak	98	Kotak	Baik	-
56	Binder Clip 100	000006	0	Kotak	0	Kotak	-	-
57	Binder Clip No 260	000007	20	Kotak	20	Kotak	Baik	-
58	Binder Clip 200	000008	14	Kotak	14	Kotak	Baik	-
59	Paper Clip Warna	000009	18	Kotak	18	Kotak	Baik	-
60	Push Pin	000010	29	Kotak	29	Kotak	Baik	-

Page 1
Page 2

61	Pembolong Kertas	000011	14	buah	14	buah	Baik	-
62	Acco besi	000012	969	Set	969	Set	Baik	-
63	Stand book	000013	0	Buah	0	Buah	-	-
64	Binder Clip 105	000014	0	Kotak	0	Kotak	-	-
65	Spiral Plastik UK 1/4"	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
66	Spiral Plastik UK 5/16"	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
67	Spiral Plastik UK 3/8"	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
68	Spiral Plastik UK 7/16"	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
69	Spiral Plastik UK 1/2"	000019	0	Buah	0	Buah	-	-
70	Spiral Plastik UK 9/16"	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
71	Spiral Plastik UK 5/8"	000021	0	Buah	0	Buah	-	-
72	Spiral Plastik UK 3/4"	000022	0	Buah	0	Buah	-	-
73	Spiral Plastik UK 1"	000023	0	Buah	0	Buah	-	-
74	Spiral Plastik UK 1 1/4"	000024	0	Buah	0	Buah	-	-
75	Spiral Plastik UK 1 1/8"	000025	0	Buah	0	Buah	-	-
76	Spiral Plastik UK 1 1/2"	000026	0	Buah	0	Buah	-	-
77	Spiral Plastik UK 1 3/4"	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
78	Spiral Plastik UK 2"	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
79	Spiral Plastik UK 2"	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
	PENGHAPUS/KOREKTOR	**1E+09**						
80	Penghapus Mesin Ketik 1BM	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
81	Penghapus Pensil	000002	70	buah	70	buah	Baik	-
82	Tip Ex Pantel	000003	25	Buah	25	Buah	Baik	-
83	Penghapus Mesin Ketik	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
84	Penghapusan pulpen	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
85	Penghapusan whaiteboard	000006	2	Buah	2	Buah	Baik	-
86	Stabilo swing boss	000007	8	Buah	8	Buah	Baik	-
87	Tip Ex Correction	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
	BUKU TULIS	**1E+09**						
88	Buku Register Besar	000001	0	Buku	0	Buku	-	-
89	Buku Register Sedang	000002	0	Buku	0	Buku	-	-
90	Buku Register Kecil	000003	2	Buku	2	Buku	Baik	-
91	Buku Register Panjang	000004	0	Buku	0	Buku	-	-
92	Buku Pengawasan Kredit	000005	0	Buku	0	Buku	-	-
93	Buku Tanda Terima LHP	000006	36	Buku	36	Buku	Baik	-
94	Buku Bon Permintaan ATK	000007	30	Buku	30	Buku	Baik	-
95	Dokumen Pengaduan	000008	0	Set	0	Set	-	-
96	Standard Buku IMAX	000009	0	Buku	0	Buku	-	-
97	Buku Agenda Folio 500	000010	8	Buku	8	Buku	Baik	-
98	Buku Agenda Folio 200	000011	16	Buku	16	Buku	Baik	-
99	Buku Agenda Folio 100	000012	11	Buku	11	Buku	Baik	-
100	Formulir hasil penelaahan	000013	23	Buku	23	Buku	Baik	-
101	Tanda terima surat	000014	27	Buku	27	Buku	Baik	-
102	Peminjaman inventaris	000015	4	Buku	4	Buku	Baik	-
103	Not box	000016	0	Buku	0	Buku	-	-
104	Kwitansi	000017	4	Buku	4	Buku	Baik	-
105	Buku Daftar Tamu	000018	28	Buku	28	Buku	Baik	-
	ORDNER DAN MAP	**1E+09**			0			
106	Stop Map	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
107	Map Snellhecter	000002	23	Lembar	23	Lembar	Baik	-
108	Odner	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
109	Box File	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
110	Map LHP	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
111	Map Biasa	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
112	Rado Arch File	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
113	Map Tulang Badan Pengawasan	000008	0	Lembar	0	Lembar	-	-
114	Map Bludru	000009	10	Lembar	10	Lembar	Baik	-
115	Box file pakai tutup	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
116	Spring file plastik	000011	157	Buah	157	Buah	Baik	-
117	Box file bantex	000012	3	Buah	3	Buah	Baik	-
118	Clear holder F4	000013	14	Buah	14	Buah	Baik	-
119	Ordner bantex folio	000014	172	Buah	172	Buah	Baik	-
120	Businis file plastik	000015	0	Buah	0	Buah	-	-

Page 4
Page 5

121	Dokumen Keeper Semi Kulit	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
122	Notepad Holder Kulit	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
123	Map Plastik L	000019	10	Lembar	10	Lembar	Baik	-
124	Map Agno Pengaduan	000020	0	Buah	0	Buah	-	-
125	Map Palstik Tali	000026	7	Buah	7	Buah	Baik	-
	PENGGARIS	**1E+09**			0			
126	Penggaris Besi 30 CM	000001	22	Buah	22	Buah	Baik	-
127	Penggaris plastik 30 CM	000002	2	Buah	2	Buah	Baik	-
128	Penggaris Besi 50 CM	000003	6	Buah	6	Buah	Baik	-
	CUTTER	**1E+09**			0			
129	Gunting Besar/Kecil/Sedang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
130	Cutter Besar (L-500)	000002	23	Buah	23	Buah	Baik	-
131	Gunting 838 (sedang)	000003	14	Buah	14	Buah	Baik	-
132	Gunting 848 (besar)	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
133	Cutter A-300	000005	19	Buah	19	Buah	Baik	-
134	Serutan pensil	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
135	Isi cutter A-300	000007	6	Pad	6	Pad	Baik	-
136	Serutan meja pensil	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
	PITA MESIN KETIK	**1E+09**			0			
137	Pita Mesin Ketik IBM	000001	12	Buah	12	Buah	Baik	-
138	Pita Mesin Ketik Manual	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
139	Pita mesin ketik Royal	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
	ALAT PEREKAT	**1E+09**			0			
140	Lem kertas	000001	0	Botol	0	Botol	-	-
141	Lem Indrakol	000002	0	Botol	0	Botol	-	-
142	Lem Glue	000003	6	Botol	6	Botol	Baik	-
143	Double Selotip	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
144	Singel Selotip	000006	12	Buah	12	Buah	Baik	-
145	Lem banteng	000007	0	Kaleng	0	Kaleng	-	-
146	Lem joyko cair	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
147	Lem dollar fixol	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
148	Lem glue stick	000010	1	Buah	1	Buah	Baik	-
149	Dispenser tape	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
150	Page marker assorted 3M	000012	0	Pad	0	Pad	-	-
151	Post it sign here 3M	000013	39	Pad	39	Pad	Baik	-
152	Scotch tape magic	000014	6	Pad	6	Pad	Baik	-
153	Post it note tape flag 3M	000015	3	Pad	3	Pad	Baik	-
154	Post it tape flag warna warni	000016	14	pad	14	pad	Baik	-
155	Post it 654 Warna	000017	0	Pad	0	Pad	-	-
156	Double selotip 3M	000018	2	Pad	2	Pad	Baik	-
157	Post it sign marker 3 M 670	000019	4	Pad	4	Pad	Baik	-
158	Mark N Notes Post It Pronto	000020	1	Pad	1	Pad	Baik	-
159	Double Selotip Sedang	000021	11	Pad	11	Pad	Baik	-
160	Double Selotip Kecil	000022	8	Pad	8	Pad	Baik	-
161	Double Tape Busa 3M	000023	11	Pad	11	Pad	Baik	-
	STADLER HD	**1E+09**						
162	Stapler HD 10 Max	000001	30	Buah	30	Buah	Baik	-
163	Stapler HD 50 Max	000002	8	Buah	8	Buah	Baik	-
164	Stapler Remover	000003	1	Buah	1	Buah	Baik	-
	STAPLES	**1E+09**						
165	Staples HD 12 N/24	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
	ISI STAPLES	**1E+09**						
166	Isi steples 1213 Max	000001	23	Kotak	23	Kotak	Baik	-
167	Isi steples 1210 Max	000002	17	Kotak	17	Kotak	Baik	-
	BARANG CETAKAN	**1E+09**						
168	Buku Peran aktif hakim dlm perkara Perdata	000001	0	Buku	0	Buku	-	-
169	Buku Pemuliaan Peradilan	000005	0	Buku	0	Buku	-	-
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA	**1E+09**						-
170	Stabilo Boss	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
171	Isi Stapler No.3-1M	000002	376	Kotak	376	Kotak	Baik	-
172	Isi Staples No.10-1M	000003	138	Kotak	138	Kotak	Baik	-
173	Isi Staples No.9/16"	000004	15	Kotak	15	Kotak	Baik	-
174	Isi staples No.5/8"	000005	20	Kotak	20	Kotak	Baik	-
175	Isi Cutter Besar	000006	64	Kotak	64	Kotak	Baik	-
176	Kalkulator Casio	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
177	Clipboard Plastik	000008	4	Buah	4	Buah	Baik	-
178	Paper Tray	000009	5	Buah	5	Buah	Baik	-
179	Desk Organizer	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
180	Data bag eagle 305	000011	0	Buah	0	Buah	-	-

Page 6
Page 7
Page 8

181	Papan whiteboard	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
182	Pembolong No. 85B Kenko	000013	0	Buah	0	Buah	-	-
183	Papan Whiteboard 45x60	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
184	Joyko numbering	000015	0	Buah	0	Buah	-	-
185	Tas Rakor	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
186	Kantong Pensil	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
	clipboard Plastik	**1E+09**						
187	Kertas HVS70 gram A4	000001	24	Rim	24	Rim	Baik	-
188	Kertas HVS 70 gram F4	000002	51	Rim	51	Rim	Baik	-
189	Kertas HVS 80 gram A4	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
190	Kertas HVS A3	000004	1	Rim	1	Rim	Baik	-
	BERBAGAI KERTAS	**1E+09**						
191	Kertas Fax	000001	13	Roll	13	Roll	Baik	-
192	Kertas Lembar Disposisi	000002	0	Buku	0	Buku	-	-
193	Kertas Memo Kecil	000003	17	buku	17	buku	Baik	-
194	Kertas memo besar	000004	7	buku	7	buku	Baik	-
195	Kartu Persediaan	000005	300	Lembar	300	Lembar	Baik	-
196	Kartu Berobat	000006	0	Lembar	0	Lembar	-	-
197	Post It 654	000007	49	Pad	49	Pad	Baik	-
198	Label T/J A4	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
199	Box arsip/kardus	000009	50	Buah	50	Buah	Baik	-
200	Kertas label Tom&Jerry	000010	276	Pak	276	Pak	Baik	-
201	Glossy photo paper	000011	10	Pak	10	Pak	Baik	-
202	Glossy photo stiker	000012	4	Pak	4	Pak	Baik	-
203	Tissu Kotak	000013	146	Kotak	146	Kotak	Baik	-
204	Tissu Roll	000014	0	Roll	0	Roll	-	-
	KERTAS COVER	**1E+09**						
205	Sampul Kertas Belakang	000001	0	Lembar	0	Lembar	-	-
206	Kertas Film F4	000002	0	Lembar	0	Lembar	-	-
207	Kertas Cover	000003	1857	Lembar	1857	Lembar	Baik	-
208	Kertas Cover F4	000004	0	Lembar	0	Lembar	-	-
209	Kertas Cover A4	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
	AMPLOP	**1E+09**						
210	Amplop Dinas kecil	000001	11990	Lembar	####	Lembar	Baik	-
211	Amplop Putih No.110	000002	25	Pak	25	Pak	Baik	-
212	Amlop Putih No.90	000003	23	Pak	23	Pak	Baik	-
213	Amplop dinas besar	000004	80	Lembar	80	Lembar	Baik	-
214	Amplop Dinas bertelinga	000005	0	Lembar	0	Lembar	-	-
215	Amplop Coklat Polos Folio Bertali	000006	93	Lembar	93	Lembar	Baik	
	KOP SURAT	**1E+09**						
216	Kop Garuda Tengah Polos	000001	1	Rim	1	Rim	Baik	-
217	Kertas Kop Surat Tugas	000002	0	Rim	0	Rim	-	-
218	Kertas Kop Surat	000003	0	Rim	0	Rim	-	-
219	Lembar disposisi	000004	0	Rim	0	Rim	-	-
220	Kop Surat MARI	000005	9	Rim	9	Rim	Baik	-
221	Kop ST timbul	000006	10	Rim	10	Rim	Baik	-
222	Kop logo garuda converor	000007	3	Rim	3	Rim	Baik	-
223	Kop garuda converor	000008	1	Rim	1	Rim	Baik	-
	KERTAS DAN COVER LAINNYA	**1E+09**						
224	Kertas pembatas A4	000001	0	Rim	0	Rim	-	-
225	Sampul plastik	000002	731	Lembar	731	Lembar	Baik	-
226	Pembatas kertas warna-warni	000003	21	Rim	21	Rim	Baik	-
	TINTA CETAK	**1E+09**						
227	Tinta Print Laser Jet 7560A	000001	0	buah	0	buah	-	-
228	Tinta Print Laser Jet 7561A	000002	0	buah	0	buah	-	-
229	Tinta Print Laser Jet 7562A	000003	0	buah	0	buah	-	-
230	Tinta Print Laser Jet 7563A	000004	0	buah	0	buah	-	-
231	Tinta Stempel	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
232	Tinta Canon 36	000006	13	buah	13	buah	Baik	-
233	Tinta Canon 35	000007	17	buah	17	buah	Baik	-
234	Karbon mesin fax	000008	0	buah	0	buah	-	-
235	Karbon mesin fax Panasonic	000009	5	buah	5	buah	Baik	-
	PLAT CETAK	**1E+09**						
236	huruf Akrilik	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
237	Backdrop	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
	BAHAN CETAK LAINNYA	**1E+09**						
238	Lakban Hitam Besar	000001	15	buah	15	buah	Baik	-
239	Bantalan Stempel	000002	6	buah	6	buah	Baik	-
240	Lakban Kecil	000003	18	buah	18	buah	Baik	-

Page 8
Page 10

241	Lakban Sedang	000004	5	buah	5	buah	Baik	-
242	Lakban Bening	000006	21	Buah	21	Buah	Baik	-
243	Lakban Coklat	000007	25	buah	25	buah	Baik	-
244	Celotape	000008	0	buah	0	buah	-	-
245	Lem Aibon	000009	0	buah	0	buah	-	-
246	Gunting Besar	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
	CONTINUOUS FORM							
247	Kertas countinous form 9 1/1x1 PLY	000001	0	Box	0	Box	-	-
	PITA PRINTER							
248	Pita Epson LQ 2190	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
	TINTA/TONER PRINTER	**1E+09**						
249	Tinta 94 (black)	000001	7	Buah	7	Buah	Baik	-
250	Tinta 95 (Color)	000002	6	Buah	6	Buah	Baik	-
251	Toner HP 12 A	000003	5	Buah	5	Buah	Baik	-
252	Tinta HP Deskjet T95	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
253	Tinta Printer HP Laserjet 2700	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
254	Tinta HP Deskjet T94	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
255	Tinta Printer Laserjet 7560A	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
256	Tinta Printer Laserjet 7561A	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
257	Tinta Printer Laserjet 7562A	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
258	Tinta Printer Laserjet 7563A	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
259	Tinta HP 57	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
260	Tinta HP 56	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
261	Tinta Canon FW 3	000013	0	Buah	0	Buah	-	-
262	Toner HP 85 A	000014	0	Buah	0	Buah	-	-
263	Tinta Epson L800 Hitam	000015	18	Buah	18	Buah	Baik	-
264	Tinta HP P3015	000016	0	Buah	0	Buah	-	-
265	Tinta Xerox Phaser 3428	000017	0	Buah	0	Buah	-	-
266	Data Print Hitam (canon tetes)	000018	0	Buah	0	Buah	-	-
267	Data Print Warna (canon tetes)	000019	0	Buah	0	Buah	-	-
268	Toner HP 12 A Refil	000020	3	Buah	3	Buah	Baik	-
269	Toner HP 85 A Refil	000021	19	Buah	19	Buah	Baik	-
270	Tinta Epson L800 Magenta	000022	13	Buah	13	Buah	Baik	-
271	Tinta Epson L800 Yellow	000023	15	Buah	15	Buah	Baik	-
272	Tinta Epson L800 Cyan	000024	15	Buah	15	Buah	Baik	-
273	Tinta Epson L800 Light Cyan	000025	15	Buah	15	Buah	Baik	-
274	Tinta Epson L800 Light Magenta	000026	12	Buah	12	Buah	Baik	-
275	Tinta HP 98 (Black)	000027	0	Buah	0	Buah	-	-
276	Tinta Brother Black	000028	0	Buah	0	Buah	-	-
277	Tinta Brother Cyan	000029	0	Buah	0	Buah	-	-
278	Tinta Brother Magenta	000030	0	Buah	0	Buah	-	-
279	Tinta Brother Yellow	000031	0	Buah	0	Buah	-	-
280	Toner HP 55A	000032	0	Buah	0	Buah	-	-
281	Toner Xerox warna	000033	0	Buah	0	Buah	-	-
282	Toner Xerox Hitam P115W	000034	5	Buah	5	Buah	Baik	-
283	Tinta HP 62 Hitam	000035	9	Buah	9	Buah	Baik	-
284	Tinta HP 62 Warna	000036	8	Buah	8	Buah	Baik	-
285	Tinta Epson L120 Black	000037	12	Buah	12	Buah	Baik	-
286	Tinta Epson L120 Magenta	000038	11	Buah	11	Buah	Baik	-
287	Tinta Epson L120 Cyan	000039	11	Buah	11	Buah	Baik	-
288	Tinta Epson L120 Yellow	000040	10	Buah	10	Buah	Baik	-
289	Toner HP 48A	000041	10	Buah	10	Buah	Baik	-
290	Toner HP 107	000042	0	Buah	0	Buah	-	-
291	Toner HP 107 (compatible chip)	000043	49	Buah	49	Buah	Baik	-
292	Toner HP 48A (compatible chip)	000044	30	Buah	30	Buah	Baik	-
	DISKET	**1E+09**						-
293	Sony CD RW 700 MB	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
294	Sony Recording AF90	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
295	DVD Verbatin	000003	0	Keping	0	Keping	-	-
	USB/FLASH DISK	**1E+09**						-
296	USB 2 GB	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
297	Flas disk 4 GB	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
298	Flash Disk 2 GB	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
299	Flash Disk 8 GB	000004	15	Buah	15	Buah	Baik	-
300	Flasdisk 32 GB	000005	0	Buah	0	Buah	-	-

301	USB Hub	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
302	Name Tag Flashdisk	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
	MOUSE							-
303	Mouse wireless	000001	7	Buah	7	Buah	Baik	-
	CD/DVD							-
304	CD Rakor	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
305	DVD RW	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
	BAHAN KOMPUTER LAINNYA	**1E+09**						-
306	Kabel Data	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
307	Mouse Pad	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
308	Kabel Power	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
309	Kabel HMDI	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
310	Hardisk Esternal	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
311	Mouse	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
312	Cooler master notepal	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
		115113						-
	SAPU DAN SIKAT	**1E+09**						-
313	Sikat Cuci	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
314	Kemoceng	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
315	Sikat Toilet	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
316	Sapu Ijuk	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
	ALAT-ALAT PEL DAN LAP	**1E+09**						-
317	Wifer Lantai	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
318	Kain Serbet	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
319	Handuk	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
320	Tissue Kotak	000004	0	Kotak	0	Kotak	-	-
321	Tissue Roll	000005	0	Roll	0	Roll	-	-
322	Kain Pel Batang	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
323	Pembilas Lantai Panjang	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
324	wifer kaca	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
362	Tissue basah Paseo Lidah Buaya	000015	40	Buah	40	Buah	Baik	-
	EMBER, SLANG, DAN TEMPAT AIR LAIN	**1E+09**						
325	Ember Besar	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
326	Ember Sedang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
327	Gayung	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
328	Karpet Karet	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
329	Dust Cotton Map	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
330	Handuk Keset	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
331	Tempat Sampah tutup	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
332	Keset	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
	ALAT PENGIKAT	**1E+09**						-
333	Tali Rami	000001	25	Roll	25	Roll	Baik	-
334	Tali Rafia	000002	0	Roll	0	Roll	-	-
	BAHAN KIMIA UNTUK PEMBERSIH	**1E+09**						
335	Pewangi lantai	000001	0	Botol	0	Botol	-	-
336	Sabun cuci	000002	0	Pak	0	Pak	-	-
337	Porsilin pembersih	000003	0	Botol	0	Botol	-	-
338	Hand Soap	000004	0	Botol	0	Botol	-	-
339	Pembersih Kaca	000005	0	Botol	0	Botol	-	-
340	Porstek	000006	0	Botol	0	Botol	-	-
341	Pembersih lantai	000007	0	Botol	0	Botol	-	-
342	Isi Aerosol	000008	0	Botol	0	Botol	-	-
343	Sabun cuci Sanlight Botol	000009	0	Botol	0	Botol	-	-
344	Sabun Cuci Sunlight biasa	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
345	Handymop	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
346	Sabun Mandi	000012	0	Botol	0	Botol	-	-
347	Semprot Nyamuk	000013	0	Botol	0	Botol	-	-
348	Kamper	000014	25	Pack	25	Pack	Baik	-
349	Pembersih Furniture	000015	0	Pack	0	Pack	-	-
350	Karbol	000016	0	Pack	0	Pack	-	-
350	HAD SANITIZER	000016	20	Botol	20	Botol	Baik	-
	ALAT UNTUK MAKAN DAN MINUM	**1E+09**						
351	Nampan	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
352	Pisau Buah	000002	0	Lusin	0	Lusin	-	-
353	Sendok Garpu	000003	0	Lusin	0	Lusin	-	-
354	Sendok Sayur	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
355	Gelas Kaca Gede	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
356	Piring Sangu	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
357	Piring	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
358	Mangkok	000010	0	Buah	0	Buah	-	-

359	Cangkir Sangu	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
360	Cangkir Set	000012	0	Buah	0	Buah	-	-
361	Sendok makan	000013	0	Lusin	0	Lusin	-	-
	PENGHARUM RUANGAN	**1E+09**						
362	Kapur Barus	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
363	Pewangi gantung	000002	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
364	By fresh	000003	0	Botol	0	Botol	-	-
365	Mesin Aerosol/Pewangi Glade	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
366	Carfresh	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
367	Toilet Boll	000006	0	Bungkus	0	Bungkus	-	-
368	Mesin pengharum ruangan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
369	Pengharum atas meja	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
370	Isi Refill Glade	000009	90	Buah	90	Buah	Baik	-
	PERABOT KANTOR LAINNYA	**1E+09**						
371	Spons Cuci piring	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
372	Kanebo	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
373	Kain kasa	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
374	Obeng	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
375	Troli Kecil	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
376	Troli Besar	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
	KABEL LISTRIK	**1E+10**						
377	Kabel NYM 2x2,5 50 M	000001	0	Roll	0	Roll	-	-
378	Kabel Roll	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
379	Kabel NYM 3x1,5 S0M	000003	0	Roll	0	Roll	-	-
380	Kabel NYM 3x2,5 50 M	000004	0	Roll	0	Roll	-	-
381	Kabel NYM HY 2x0,75 50M	000005	0	Roll	0	Roll	-	-
	LAMPU LISTRIK	**1E+09**						
382	Lampu Philips 22 Watt	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
383	Lampu Philip 36 Watt	000002	0	buah	0	buah	-	-
	STOP KONTAK	**1E+09**						
384	Kabel Colokan 5 M	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
	SAKLAR	**1E+09**						
385	Saklar 4 lubang	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
386	Saklar 3 lubang	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
387	Saklar 2 lubang	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
	Balast	**1E+09**						
388	Balast	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
	BATU BATERAI	**1E+09**						
389	Batterai Alkalin (AA)	000001	47	set	47	set	Baik	-
390	Batu Baterai Alkalin (AAA)	000002	45	set	45	set	Baik	-
391	Battery kotak 9 volt	000003	2	Buah	2	Buah	Baik	-
	ALAT LISTRIK LAINNYA	**1E+09**						-
392	Rumah lampu Down light	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
	ATRIBUT	**1E+09**						-
393	Kartu Peserta & Tali	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
	ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANT	**1E+10**						
394	Buku Agenda Rakor	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
395	Nam Tag	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
396	Tas Laptop Predator Cartenz 14"	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
397	Tas Laptop Prodige Cartenz RC 14"	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
398	Tas Laptop Lucerne LT + RC Cartenz 14"	000005	0	Buah	0	Buah	-	-
399	Tas Laptop Inicode Cartenz 14"	000006	0	Buah	0	Buah	-	-
400	Tas Pemeriksaan	000007	0	Buah	0	Buah	-	-
401	Koper Pemberkasan Pemeriksaan	000008	0	Buah	0	Buah	-	-
402	Koper Pemberkasan Pemeriksaan 1	000009	0	Buah	0	Buah	-	-
403	Materai 3000	000010	0	Buah	0	Buah	-	-
404	Materai 6000	000011	0	Buah	0	Buah	-	-
405	Kantong Plastik	000012	8	Pack	8	Pack	Baik	-
	OBAT CAIR							
406	Obat Nyamuk	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
		115128						-
	BARANG PERSEDIAAN	**1E+09**						
407	Tas Sosialisasi	000001	0	Buah	0	Buah	-	-
408	Tas Jinjing Sosialisasi	000002	0	Buah	0	Buah	-	-
409	Buku Manajemen Pengawasan	000003	0	Buah	0	Buah	-	-
410	Buku Himpunan Peraturan Perundang	000004	0	Buah	0	Buah	-	-
411	Buku Pemuliaan Peradilan Bawas.	000005	0	Buah	0	Buah	-	-

Page 16
Page 18

C. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2021 Tanggal 23 November 2020 dengan jumlah PAGU (REVISI KE - 3 tanggal 28 Oktober 2021) sebesar Rp. 24.745.576.000,- terdiri dari:

1. **BELANJA PEGAWAI**

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2021 yaitu:

a. **Pagu** : **Rp. 5,847,927,000,-(100%)**

(lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

b. **Realisasi** : **Rp. 5.765.457.110,- (98,59%)**

(lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah)

c. **Sisa** : **Rp. 82.469.890,- (1,41%),-**

(delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Grafik 3.14 Belanja Pegawai Tahun 2021

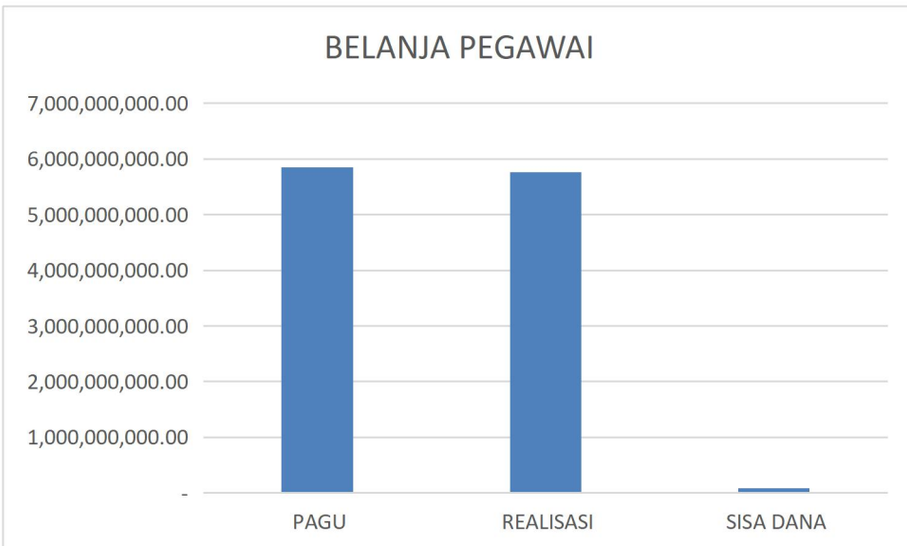

2. **BELANJA BARANG**

Pengelolaan belanja barang tahun anggaran 2021 yaitu:

a. **Pagu** : **Rp. 18.197.649.000,-**

(delapan belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

b. **Realisasi** : **Rp. 17.353.966.888**

(tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

c. **Sisa** : **Rp. 843.692.112**

(delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua belas rupiah).

Grafik 3.15 Belanja Barang Tahun 2021

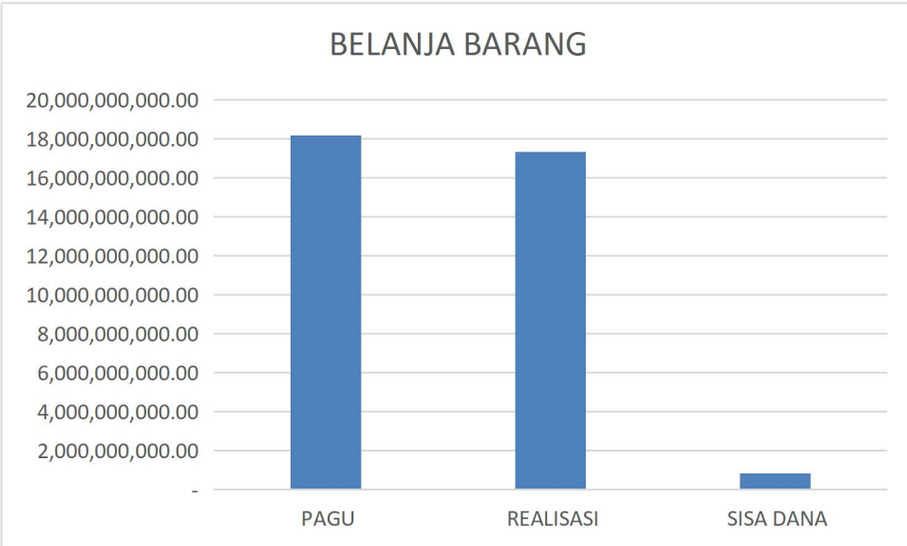

3. BELANJA MODAL

Pengelolaan belanja modal tahun anggaran 2021 yaitu:

a. Pagu : Rp. 700.000.000,-

(tujuh ratus juta rupiah)

b. Realisasi : Rp. 699.605.935,-

(enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)

c. Sisa : Rp. 394.065,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh lima rupiah)

Grafik 3.16 Belanja Modal Tahun 2021

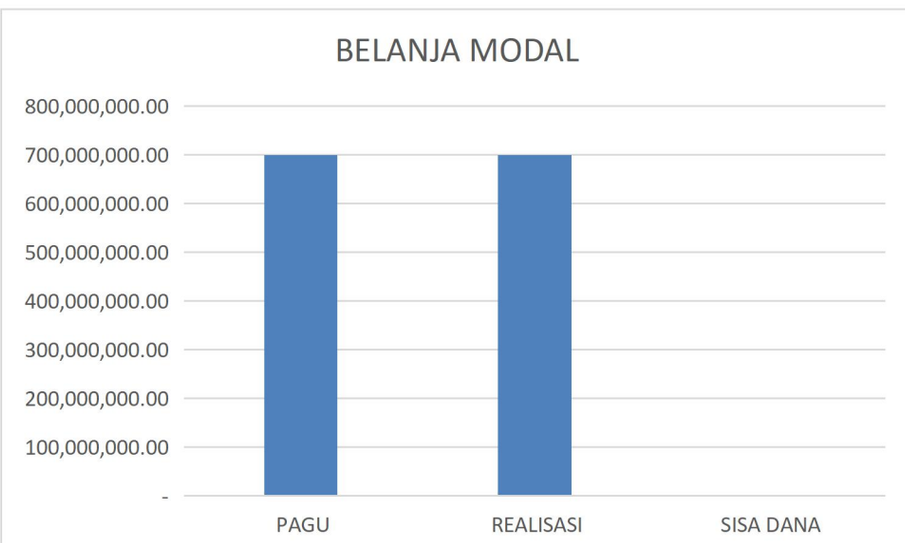

Tabel 3.29 Data Per Output & Satuan Belanja TA 2021

Sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 005.07.1.663136/2021 Tanggal 23 November 2020

Kode	Uraian	REALISASI ANGGARAN		
		pagu	realisasi	sisa
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 40.121.263.000	Rp 811.008.113	Rp 39.310.254.887
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	Rp 6.162.153.000	Rp -	Rp 6.162.153.000
1077.EAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 4.510.953.000	Rp -	Rp 4.510.953.000
001	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Rp 4.510.953.000	Rp -	Rp 4.510.953.000
051	LHP Wilayah I	Rp 4.510.953.000	Rp -	Rp 4.510.953.000
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 1.878.948.000	Rp -	Rp 1.878.948.000
B	Pemeriksaan Reguler	Rp 681.877.000	Rp -	Rp 681.877.000
C	Pemeriksaan Kinerja	Rp 831.777.000	Rp -	Rp 831.777.000
D	Pemeriksaan Barang dan Jasa	Rp 39.020.000	Rp -	Rp 39.020.000
E	Pemeriksaan Keuangan	Rp 57.672.000	Rp -	Rp 57.672.000
F	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 29.868.000	Rp -	Rp 29.868.000
G	Pemeriksaan LKJiP	Rp 33.756.000	Rp -	Rp 33.756.000
H	Pemeriksaan Monitoring	Rp 898.035.000	Rp -	Rp 898.035.000
I	Administrasi Penanganan dan Pelaporan Pengaduan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
J	Analisa Kebijakan Pengawasan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
1077.TAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 1.651.200.000	Rp -	Rp 1.651.200.000
001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Rp 1.651.200.000	Rp -	Rp 1.651.200.000
051	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Rp 1.651.200.000	Rp -	Rp 1.651.200.000
A	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Rp 1.651.200.000	Rp -	Rp 1.651.200.000
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	Rp 6.721.384.000	Rp -	Rp 6.721.384.000
1078.EAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 5.127.784.000	Rp -	Rp 5.127.784.000
001	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Rp 5.127.784.000	Rp -	Rp 5.127.784.000
051	LHP Wilayah II	Rp 5.127.784.000	Rp -	Rp 5.127.784.000
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 2.280.583.000	Rp -	Rp 2.280.583.000
B	Pemeriksaan Reguler	Rp 597.228.000	Rp -	Rp 597.228.000
C	Pemeriksaan Kinerja	Rp 689.734.000	Rp -	Rp 689.734.000
D	Pemeriksaan Barang dan Jasa	Rp 21.020.000	Rp -	Rp 21.020.000
E	Pemeriksaan Keuangan	Rp 42.008.000	Rp -	Rp 42.008.000
F	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 28.876.000	Rp -	Rp 28.876.000
G	Reviu LK	Rp 84.824.000	Rp -	Rp 84.824.000
H	Reviu RKA-KL / RKBMN	Rp 55.000.000	Rp -	Rp 55.000.000
I	Reviu Pengelolaan Anggaran	Rp 55.000.000	Rp -	Rp 55.000.000
J	Reviu Hibah	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 14.400.000
K	Reviu pernyataan yang telah diverifikasi	Rp 28.800.000	Rp -	Rp 28.800.000
L	Evaluasi SPIP	Rp 55.000.000	Rp -	Rp 55.000.000
M	Evaluasi LKjIP	Rp 200.000.000	Rp -	Rp 200.000.000
N	Reviu PIPK	Rp 55.000.000	Rp -	Rp 55.000.000
O	Reviu PNBP	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 14.400.000
P	Penilaian Tim TPI ZI	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000
Q	Evaluasi RB MA	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 100.000.000
R	Pemeriksaan Monitoring	Rp 695.911.000	Rp -	Rp 695.911.000
S	Administrasi Penanganan dan Pelaporan Pengaduan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
T	Analisa Kebijakan Pengawasan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
1078.TAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 1.593.600.000	Rp -	Rp 1.593.600.000
001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Rp 1.593.600.000	Rp -	Rp 1.593.600.000
051	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Rp 1.593.600.000	Rp -	Rp 1.593.600.000
A	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Rp 1.593.600.000	Rp -	Rp 1.593.600.000

1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahka	Rp 15.327.451.000	Rp 811.008.113	Rp 14.516.442.887
1079.EAA	Layanan Perkantoran	Rp 9.047.036.000	Rp 811.008.113	Rp 8.236.027.887
001	Gaji dan Tunjangan	Rp 5.847.927.000	Rp 747.244.113	Rp 5.100.682.887
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 3.199.109.000	Rp 63.764.000	Rp 3.135.345.000
1079.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp 300.000.000	Rp -	Rp 300.000.000
A	Penyusunan Rencana dan Program	Rp 300.000.000	Rp -	Rp 300.000.000
1079.EAC	Layanan Umum	Rp 938.695.000	Rp -	Rp 938.695.000
001	Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum	Rp 938.695.000	Rp -	Rp 938.695.000
A	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran Pimpinan	Rp 550.000.000	Rp -	Rp 550.000.000
B	Tata administrasi kearsipan	Rp 68.200.000	Rp -	Rp 68.200.000
C	Kerumah tanggaan	Rp 320.495.000	Rp -	Rp 320.495.000
1079.EAD	Layanan Sarana Internal	Rp 200.000.000	Rp -	Rp 200.000.000
A	Pengadaan Sarana Internal	Rp 200.000.000	Rp -	Rp 200.000.000
1079.EAF	Layanan SDM	Rp 335.000.000	Rp -	Rp 335.000.000
A	Administrasi Kepegawaian	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000
B	Bimtek SDM / In house Training	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 100.000.000
C	Assesment	Rp 150.000.000	Rp -	Rp 150.000.000
D	Pelantikan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000
E	E-LHKPN/GRATIFKASI	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 25.000.000
1079.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 230.000.000	Rp -	Rp 230.000.000
A	LKjIP Bawas	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
B	Administrasi Tata Laksana	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000
C	Laptah Bawas	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000
D	RB Bawas	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 50.000.000
E	IACM	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 25.000.000
F	SPIP	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 25.000.000
1079.EAJ	Layanan Data dan Informasi	Rp 150.000.000	Rp -	Rp 150.000.000
A	Terintegrasi Siwas, Bawas Care, E-Monev dan Aplikasi PMPZI	Rp 150.000.000	Rp -	Rp 150.000.000
1079.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rp 3.725.920.000	Rp -	Rp 3.725.920.000
A	Hakim Pengawas Bidang	Rp 605.730.000	Rp -	Rp 605.730.000
B	Penanganan Pengaduan	Rp 644.852.000	Rp -	Rp 644.852.000
C	Quality Assurance	Rp 626.168.000	Rp -	Rp 626.168.000
D	Consulting	Rp 285.836.000	Rp -	Rp 285.836.000
E	Pemeriksaan Probity	Rp 212.168.000	Rp -	Rp 212.168.000
F	TLHP BPK	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 100.000.000
G	LO	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 100.000.000
H	Pemeriksaan lintas propinsi / tujuan tertentu/cek fisik / saber pungli / investigasi / unit intelejen / sidak / MS	Rp 848.960.000	Rp -	Rp 848.960.000
I	Pemanggilan Pemeriksaan	Rp 149.206.000	Rp -	Rp 149.206.000
J	Kerjasama antar Pemerintah	Rp 53.000.000	Rp -	Rp 53.000.000
K	Sidang MKH	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 100.000.000
1079.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	Rp 400.800.000	Rp -	Rp 400.800.000
A	Pengelolaan Perbendaharaan	Rp 250.800.000	Rp -	Rp 250.800.000
B	Pengelolaan Laporan Keuangan	Rp 150.000.000	Rp -	Rp 150.000.000
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	Rp 6.721.506.000	Rp -	Rp 6.721.506.000
5258.EAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 4.477.177.000	Rp -	Rp 4.477.177.000
001	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Rp 4.477.177.000	Rp -	Rp 4.477.177.000
051	LHP Wilayah III	Rp 4.477.177.000	Rp -	Rp 4.477.177.000
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 1.789.838.000	Rp -	Rp 1.789.838.000
B	Pemeriksaan Reguler	Rp 889.919.000	Rp -	Rp 889.919.000
C	Pemeriksaan Kinerja	Rp 928.189.000	Rp -	Rp 928.189.000
D	Pemeriksaan Barang dan Jasa	Rp 40.452.000	Rp -	Rp 40.452.000
E	Pemeriksaan Keuangan	Rp 76.716.000	Rp -	Rp 76.716.000
F	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 39.336.000	Rp -	Rp 39.336.000
G	Pemeriksaan LKJiP	Rp 43.468.000	Rp -	Rp 43.468.000
H	Pemeriksaan Monitoring	Rp 609.259.000	Rp -	Rp 609.259.000
I	Administrasi Penanganan dan Pelaporan Pengaduan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
J	Analisa Kebijakan Pengawasan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
5258.TAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 2.244.329.000	Rp -	Rp 2.244.329.000
001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Rp 2.244.329.000	Rp -	Rp 2.244.329.000
051	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Rp 2.244.329.000	Rp -	Rp 2.244.329.000
A	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Rp 2.244.329.000	Rp -	Rp 2.244.329.000
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	Rp 5.188.769.000	Rp -	Rp 5.188.769.000
5259.EAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 3.754.875.000	Rp -	Rp 3.754.875.000
001	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Rp 3.754.875.000	Rp -	Rp 3.754.875.000
051	LHP Wilayah IV	Rp 3.754.875.000	Rp -	Rp 3.754.875.000
A	Pemeriksaan Kasus	Rp 1.242.306.000	Rp -	Rp 1.242.306.000
B	Pemeriksaan Reguler	Rp 773.758.000	Rp -	Rp 773.758.000
C	Pemeriksaan Kinerja	Rp 921.159.000	Rp -	Rp 921.159.000
D	Pemeriksaan Barang dan Jasa	Rp 49.744.000	Rp -	Rp 49.744.000
E	Pemeriksaan Keuangan	Rp 91.000.000	Rp -	Rp 91.000.000
F	Pemeriksaan Kepegawaian	Rp 34.916.000	Rp -	Rp 34.916.000
G	Pemeriksaan LKJiP	Rp 49.124.000	Rp -	Rp 49.124.000
H	Pemeriksaan Monitoring	Rp 532.868.000	Rp -	Rp 532.868.000
I	Administrasi Penanganan dan Pelaporan Pengaduan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
J	Analisa Kebijakan Pengawasan	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
5259.TAK	Layanan Pengawasan Internal	Rp 1.433.894.000	Rp -	Rp 1.433.894.000
001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Rp 1.433.894.000	Rp -	Rp 1.433.894.000
051	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Rp 1.433.894.000	Rp -	Rp 1.433.894.000
A	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Rp 1.433.894.000	Rp -	Rp 1.433.894.000

- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.093.817.000 dan mengalami revisi DIPA untuk pemotongan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 sebanyak 15.375.687.000,- menjadi Rp. 24.745.576.000 digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp 5.847.927.000
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp 3.199.109.000
- Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas, pembinaan, tindaklanjut pengaduan dan Reviu RKAKL) sebesar Rp 18.197.649.000
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp 700.000.000

➢ Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Dalam rangka perkembangan penanganan pengaduan setiap tahunnya, maka diperlukan perkembangan personel Badan Pengawasan. Sehingga diperlukan perkembangan alokasi anggaran setiap tahunnya, berikut perkembangan alokasi anggaran dalam kurun waktu 4 tahun terakhir :

Tabel 3.30 Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

No	Unit	Tahun Anggaran APBN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Badan Pengawasan	31.400.000.000	33.944.916.000	33.650.412.000	31.972.336.000	40.093.817.000 Revisi menjadi 24.745.576.000

D. REGULASI TAHUN 2021

Badan Pengawasan sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2021 Badan Pengawasan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2021. Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan

Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2021.

2. Reviu RKA K/L

Pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2021 dengan catatan sebagai berikut:

- Terdapat pergeseran-pergeseran kegiatan yang sifatnya dukungan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ke Program Dukungan Manajemen sebagai implikasi dari RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran).
- Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM, pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat, kesalahan peruntukan akun belanja
- Semua Belanja Modal belum dialokasikan ke satuan kerja di RKA-KL BUA (DIPA 01) masih dipusatkan pada DIPA BUA sehingga belum ada satuan kerja yang yang menyiapkan data dukungnya
- Terdapat Estimasi Pendapatan Fungsional pada Eselon 1 Badan Urusan Administrasi,
- Masih terdapat belanja meterai senilai @Rp6.000,-
- Terdapat penambahan pagu belanja modal Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) msih terpusat di BUA, belum dilengkapi data dukung seperti TOR, RAB, Volume riil dan rekapitulasi detail satker pengguna,

3. Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ

Realisasi penyerapan anggaran belanja Mahkamah Agung RI sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 atas 917 Satker pada Mahkamah Agung RI adalah sebesar Rp7.562.044.996.431,00 atau 70,52% dari total anggaran setahun dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Real
1.	Belanja Pegawai	6.923.076.211.000	5.289.385.324.524	76,40
2.	Belanja Barang	2.199.746.068.000	1.420.287.236.847	64,57
3.	Belanja Modal	1.601.098.351.000	852.372.435.060	53,24
4.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5.	Belanja Lainnya	-	-	-
Jumlah		**10.723.920.630.000**	**7.562.044.996.431**	**70,52**

Atas total realisasi sebesar 70,52% tersebut dikategorikan cukup tinggi karena jika penyerapan anggaran Mahkamah Agung dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp7.887.635.692.960,00 maka persentase realisasinya sudah mencapai 95,87%. Selain itu juga berdasarkan data dari spanint.kemenkeu.go.id berupa laporan peringkat realisasi belanja atas 87 K/L, Mahkamah Agung RI menduduki peringkat 6.

Pengadaan Barang dan Jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 289 paket dengan nilai Rp1.123.410.705.355,00 atau 96% dari total PBJ tender yang sudah diinput di SiRUP, dengan rincian sebagai berikut:

Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)
Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021	299	1.379.828.543.000
PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP	6	206.121.473.000
PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP	293	1.173.707.070.000
PBJ melalui tender yang belum dilelang	-	-
PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang	10	9.381.244.000
PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	289	1.123.410.705.355
Progres fisik kontrak kurang dari 50%	143	554.538.545.150
Progres fisik kontrak 50% - 99%	58	377.773.809.895
Progres fisik kontrak 100% (PHO)	98	146.564.027.528

Terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum diinput ke dalam SiRUP sebesar 6 paket dengan nilai Rp206.121.473.000,00. Hal ini disebabkan oleh Satuan kerja belum melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup sesuai dengan revisi DIPA terakhir. Rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menghimbau satuan kerja yang melakukan revisi DIPA terakhir agar melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup **Tidak terdapat** rencana PBJ melalui tender yang belum dilelang.

4. Reviu Revisi Anggaran

Reviu Revisi Anggaran dilaksanakan pada beberapa Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, diantaranya :

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan April 2021. Catatan : Terdapat revisi Anggaran terkait pergeseran antar program dalam unit eselon 1 yang sama dan pergeseran antar KRO dalam program yang sama (Program Dukungan Manajemen) dari Layanan Umum ke Layanan Sarana Internal berupa pembuatan aplikasi E-Pelaporan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
b. Pengadilan Militer II-08 Jakarta dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Catatan : Terdapat Revisi Anggaran berkaitan dengan pergeseran anggaran antar-program yakni penambahan anggaran pada DIPA Dirjen Badimiltun (663268) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang dialokasikan dari DIPA Badan Urusan Administrasi (663157) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp52.776.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
c. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.

   Catatan :

   1) Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat tim yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait *refocusing* dan realokasi belanja sebesar Rp.19.052.794.000 (Sembilan belas milyar lima puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), semula Rp.172.085.320 menjadi sebesar Rp.153.032.526.000 (seratus lima puluh tiga milyar tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.
   2) Penghematan anggaran sebesar Rp.19.052.794.000 (sembilan belas milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dapat dipenuhi mengingat penyerapan anggaran masih rendah dan atas penghematan tersebut tidak mengurangi output (keluaran) dari kegiatan dalam penganggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan melakukan efisiensi dalam pelaksanaannya;
   3) Revisi anggaran ini menyebabkan penambahan anggaran pada rincian masing-masing akun belanja pada output-output kegiatan penganggaran dengan total sebesar Rp.11.086.781.000 (sebelas milyar delapan puluh enam juta tujuh delapan puluh satu ribu rupiah);

4) Dari penambahan anggaran sebagaimana poin (2) tersebut terdapat belanja modal berupa pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan tanah, dan pembangunan Gedung dengan total penambahan belanja modal sebesar Rp.6.722.250.000 (enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan data dukung telah dipenuhi oleh satuan kerja.

5. Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP

Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada beberapa Satuan Kerja di Lingkungan mahkamah Agung RI diantaranya :

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Catatan : Revisi Anggaran berkaitan dengan Pergeseran Anggaran antar-KRO/RO (Perubahan Anggaran Belanja yang bersumber dari PNBP) yakni penambahan Pagu Anggaran bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan Sosialisasi PNBP Teknis sebesar Rp851.750.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); kegiatan Rapat Konsultasi Penyelesaian Perkara sebesar Rp6.670.387.500,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Yustisial sebesar Rp5.818.637.500,- (lima milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total penggunaan anggaran PNBP Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp13.340.775.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milliter dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Catatan : Revisi Anggaran berkaitan dengan Pergeseran Anggaran antar-KRO/RO (Perubahan Anggaran Belanja yang bersumber dari PNBP) yakni penambahan Pagu Anggaran bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan Koordinasi dan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sebesar Rp196.232.480,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Catatan : Revisi Anggaran berkaitan dengan Pergeseran Anggaran antar-KRO/RO (Perubahan Anggaran Belanja yang bersumber dari PNBP) yakni penambahan Pagu Anggaran bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan Koordinasi sebesar Rp1.929.547.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sebesar Rp781.550.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penggunaan anggaran PNBP Tahun Anggaran

2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp2.711.097.000,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

6. Reviu Hibah

Reviu Hibah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Curup pada bulan Januari 2021. Catatan :

a. Terdapat ketidaksesuaian informasi terkait luas Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I (2010101001) NUP 2 yang seharusnya 1.800 m2 sesuai dengan hasil perbaikan kembali penilaian BMN 2020.
b. Terdapat informasi yang tidak sesuai terkait tanah kosong atas objek hibah Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I (2010101001) NUP 2 yang seharusnya sebagian luas lahan dipergunakan untuk Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (4010201004) NUP 1 sebagai Rumah Dinas Ketua Pengadilan.
c. Telah dilakukan pemecahan sertifikat tanah No 00012 untuk objek hibah Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I (2010101001) NUP 2 tanggal 05-11-2018 dari luas 1.800 m2 menjadi luas 1.105 m2 dan sertifikat No 00025 luas 695 m2, akan tetapi belum diikuti dengan koreksi pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan luas di sertifikat.
d. Terdapat perbedaan penyajian atas nilai perolehan Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I (2010101001) NUP 1 dan NUP 2 antara Daftar Rincian BMN Yang Dihibahkan, Laporan Kondisi Barang per 15 Desember 2020, dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Kuasa Pengguna Barang Nomor: LHIP-243/REV/WKN.05/KNL.01/2020 tanggal 29 September 2020.
e. Terdapat pencatatan objek hibah Rumah Negara Gol II Tipe A Permanen (4010202001) NUP 1 pada aplikasi SIMAK BMN Pengadilan Agama Curup yang seharusnya Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (4010201004) NUP 2 sesuai dengan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Kuasa Pengguna Barang Nomor : LHIP- 243/REV/WKN.05/KNL.01/2020 tanggal 29 September 2020.
f. Terdapat penyajian luas Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (4010201004) NUP 2 tidak sesuai dengan dokumen IMB pada dokumen PSP Nomor: KEP-006/KM.6/WKN.5/KNL.01/2019 tanggal 29 Januari 2019 dan tercatat pada aplikasi SIMAK BMN.
g. Belum dilakukan pemungutan sewa atas pemanfaatan Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (4010201004) NUP 2.

7. *Liaison Officer* (LO)

Sampai dengan semester pertama tahun 2021 diperoleh informasi melalui entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2020, menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku Penanggungjawab pemeriksa maka diperlukan Liaison Officer untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan auditee yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif.

Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai Liaison Officer pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya untuk Mahkamah Agung RI.

8. Probity Audit

Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringaan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadan barang/jasa.

Probity Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku. Tahun 2021, probity audit dilaksanakan pada 20 (dua puluh) satuan kerja.

Adapun catatan atas hasil pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan penggunaan akun 533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) yang tidak menyisakan bangunan lama.
- Sisa bongkaran belum dilakukan proses pelelangan dan dimanfaatkan oleh kontraktor.
- Lemahnya pengendalian pelaksanaan kontrak oleh PPK yang mengakibatkan potensi keterlambatan pekerjaan dan kurangnya mutu pelaksanaan pekerjaan.
- Konsultan Perencana tidak menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan secara berkala.
- Belum adanya penetapan / persetujuan personil lapangan oleh PPK atas Jasa Konsultan Pengawasan yang mempengaruhi hasil pengawasan.
- Kondisi kontrak kritis tidak dikelola secara memadai.

- Penyajian Laporan Progres Pekerjaan Minggu tidak sesuai dengan kondisi lapangan berakibat pembayaran termyn yang belum jatuh tempo.
- Terdapat Pelaksanaan Addendum Kontrak yang tidak sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUM) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- Potensi kegiatan pembangunan Gedung kantor membentuk barang peralatan dan mesin.

BAB IV
PENGAWASAN

A. PROGRAM PEMBARUAN

1. PENGEMBANGAN APLIKASI EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pelaksana pengawasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menginisiasi pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Visi Mahkamah Agung "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung".

Dalam melakukan pembangunan sistem manajemen anti penyuapan tersebut, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan beberapa pihak dengan hasil 7 (tujuh) satuan kerja yang terdiri atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pada tanggal 30 Desember 2019 ke 7 (tujuh) satuan kerja tersebut telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.

Sebagai kelanjutan dari pembangunan sistem manajemen anti penyuapan maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi untuk memastikan berjalannya sistem manajemen anti penyuapan pada satuan kerja tersebut di atas.

Evaluasi tersebut akan dilakukan secara mandiri oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung sehingga untuk itu perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi untuk memastikan berjalannya sistem manajemen anti penyuapan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor : 41/BP/SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor : 42/BP/SK/VII/2021 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Negeri.

Gambar 1 Tampilan Halaman Login
Aplikasi Evaluasi SMAP

Pembangunan aplikasi evaluasi SMAP dilaksanakan oleh Aparatur Badan Pengawasan, adapun *flowchart* pada aplikasi evaluasi SMAP dapat digambarkan sebagai berikut:

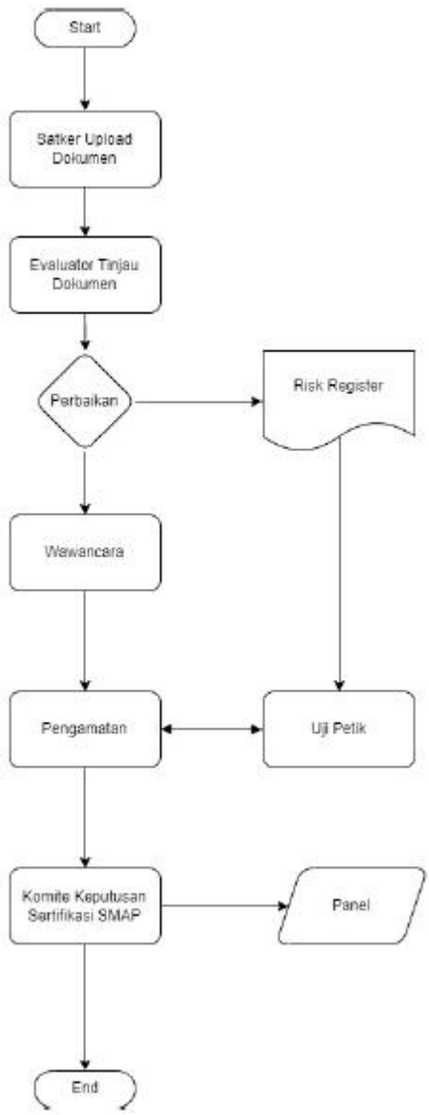

Gambar 2. Flowchart Aplikasi Evaluasi SMAP

Teknologi Aplikasi yang digunakan berbasis web yang dibangun menggunakan *Framework Codeigniter* dan menggunakan database *MariaDb* yang merupakan *opensource*.

Keunggulan aplikasi digunakan untuk pembangunan SMAP yang sudah ditunjuk sebagai *pilot project* pada 7 Pengadilan Negeri dan digunakan untuk melakukan penilaian evaluasi oleh Tim Evaluator SMAP.

Fitur Aplikasi :

- Satuan kerja dapat mengupload data dukung masing-masing instrumen dalam pembangunan SMAP.
- Penilaian Evaluasi oleh Tim Evaluator
- Tim Evaluator dapat memberikan catatan terhadap instrumen dari satuan kerja.

Tujuan Pengembangan Aplikasi Evaluasi SMAP :

1. Untuk memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap satker untuk mendapatkan sertifikasi SMAP.
2. Agar Satker dalam melakukan pembangunan SMAP dan Tim Evaluator yang mengevaluasi dapat bekerja efisien dan efektif secara lebih cepat dan mudah.
3. Dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap satker yang ditunjuk dalam evaluasi SMAP.

2. PENGEMBANGAN APLIKASI *SIWAS* TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI EPOST

Dalam manajemen administrasi persuratan berbasis digital, terdapat potensi penghematan penghematan dalam penggunaan anggaran, serta memberikan fleksibelitas, efektifitas dan efisien yang menunjang mobilitas Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relatif tinggi. Hal tersebut di atas sebagai landasan dibangunnya Aplikasi Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (*ePost)* yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).

ePost hadir menyediakan solusi dalam mempercepat proses disposisi, ekspedisi dan tindaklanjut serta dapat mendeteksi setiap tahapan proses dari surat masuk. Kemudian para pimpinan diberikan kemudahan dalam memberikan disposisi dan memonitoring proses persuratan melalui perangkat selulernya. Selain itu seluruh surat masuk telah *didigitalisasi* ke dalam sistem sehingga seluruh pengguna dapat langsung membaca dan mempelajari isi surat serta melakukan konsep surat dan koreksi langsung dari aplikasi.

ePost telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) perihal penanganan pengaduan dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) perihal autentikasi dan data pengguna. *ePost* dilengkapi juga dengan beberapa fitur antara lain :

ePost telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) perihal penanganan pengaduan dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) perihal autentikasi dan data pengguna. ePost dilengkapi juga dengan beberapa fitur antara lain:

1. Registrasi, registrasi surat untuk mendapatkan nomor surat;
2. *Qr Code*, kode batang untuk dipindai untuk melihat tahapan proses atau proses ekspedisi;
3. Disposisi, penentuan tindaklanjut surat;
4. Pengolahan, proses penyelesaian tindak lanjut surat;
5. *Redudansi*, mendeteksi dan menggabungkan surat yang sama atau identik;
6. Konsep surat, pembuatan surat dan koreksi secara digital;
7. Pengarsipan, pengalokasi arsip file digital yang tersinkronisasi dengan alokasi berkas fisik.

Berikut antarmuka *Epost:*

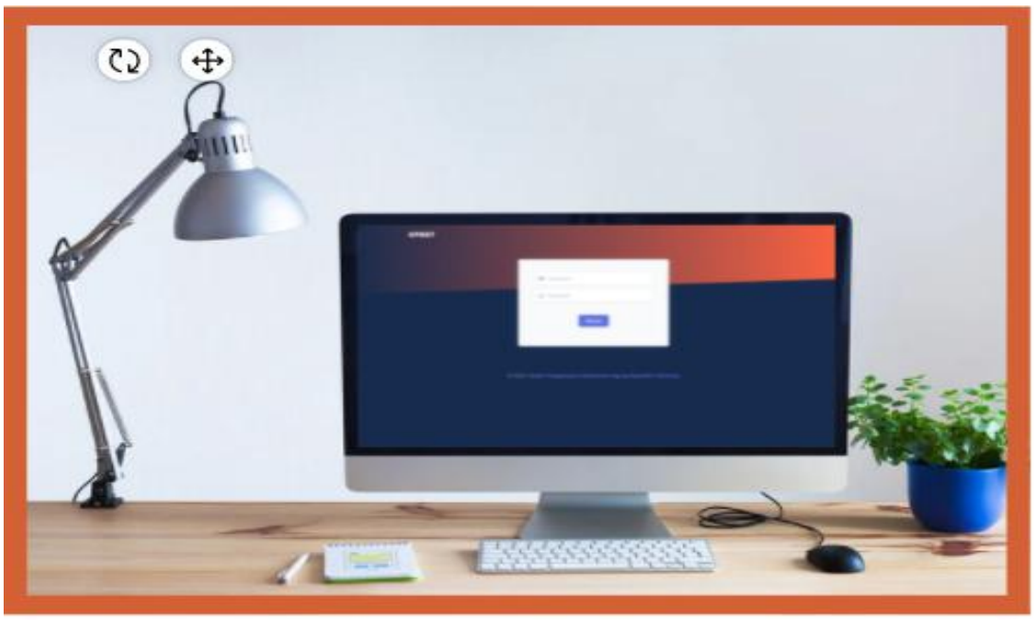

Gambar 3. Tampilan Halaman Login Aplikasi Epost

3. Pengembangan Integrasi Data Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung Dengan Aplikasi PMPZI Kemenpan RB

Terdapat penambahan fitur pada aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id yakni fitur integrasi data dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sehingga lalulintas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas beserta data dukung dapat dikirim secara cepat dan

efektif, dan Kemenpan RB mengapresiasi atas kesesuaian usulan TPI dengan kelengkapan data dukung yang lengkap (mencapai 100%).

Tim pengembang aplikasi merespon kebutuhan unit kerja pada saat pelaksanaan survei eksternal yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB diperlukan beberapa dokumen pendukung survei yakni:

1. Informasi Jumlah Responden Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas SHPRBZI;
2. Permohonan Penggunaan Perangkat Terpusat;
3. Permohonan Penggunaan *Qrcode*

Berikut tampilan menu integrasi data dan Dokumen Responden Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung:

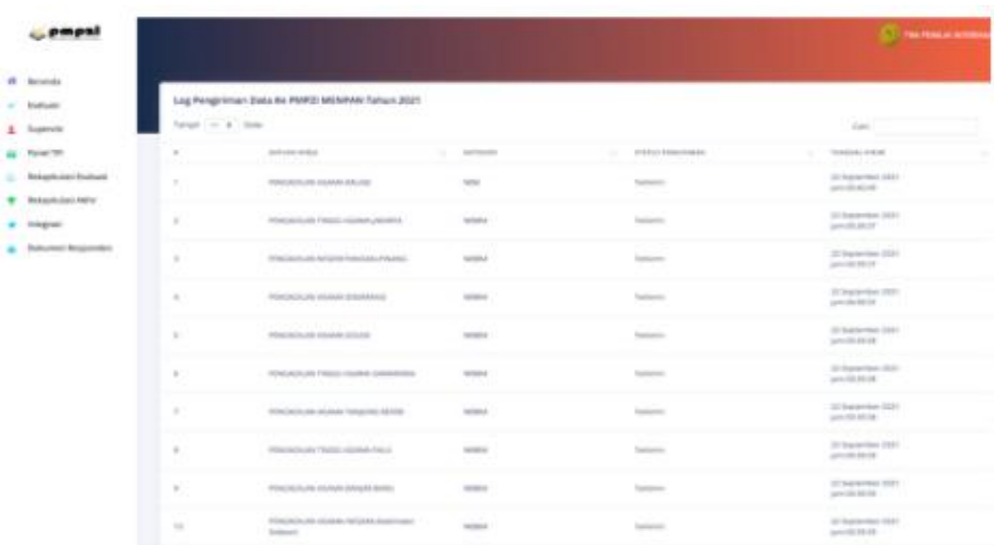

Gambar 4. Tampilan Integrasi Data Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung

Gambar 5. Tampilan Dokumen Responden Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung

B. PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

1. PENANGANAN PENGADUAN

Tahun 2021 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.069 pengaduan, dengan rincian :

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2021

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.860
2.	Pengaduan dari instansi (*stakeholder* Mahkamah Agung)	211
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	998
Jumlah		**3.069**

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2021

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		267
2.	Selesai diproses		2.802
	a. Diperiksa Tim Bawas	64	
	b. Delegasi ke Pengalidan Tingkat Banding	38	
	c. Konfirmasi	96	
	d. Klarifikasi	944	
	e. Memorandum / Delegasi Internal	144	
	f. Dijawab Surat	931	
	g. Pelaksanaan Pemantauan	106	
	h. Diarsipkan	53	
	i. Gabung berkas	418	
	j. Dicabut	8	
Jumlah		2.802	

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan yang masuk sejumlah 3.069 pengaduan dimana pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 267 pengaduan sedangkan yang telah selesai diproses sejumlah 2.802 pengaduan. data tersebut menunjukkan kinerja Badan Pengawasan dalam menyelesaikan pengaduan sebesar 91%.

2. SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 (tiga) orang Hakim:

Nama : FNN

Satuan Kerja : Hakim Pengadilan PTUN.Tanjung Pinang

Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Nama : JW

Satuan Kerja : Hakim PN.Sampang (dahulu Hakim PN.Menggala)

Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PengadilanTinggi Maluku Utara

Nama : MJP

Satuan Kerja : Hakim PN.Pacitan (dahulu Hakim PN.Menggala)

Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Maluku Utara

3. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2021 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 284 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	25	23	84	132
	Hakim Ad Hoc	-	1	5	6
2	Panitera	6	5	8	19
3	Sekretaris	3	3	4	10
4	Panitera Muda	11	3	8	22
5	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6	Jurusita	1	7	2	10
7	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10	Staff	10	4	4	18
Jumlah		**74**	**60**	**150**	**284**

Selain itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan, sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti pada tabel berikut:

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	202
2.	Panitera	25
3.	Sekretaris	4
4.	Panitera Muda	17
5.	Panitera Pengganti	26
6.	Jurusita	8
7.	Jurusita Pengganti	2
8.	Pejabat Struktural	7
9.	Staff	1
10.	Calon Hakim	-
11.	Honorer	5
TOTAL		**297**

4. KEGIATAN PEMERIKSAAN

a. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja, seperti tabel berikut:

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	5	11	8	2	26
Peradilan	7	8	5	4	24

Agama					
Peradilan Militer	-	-	-	-	-
Peradilan TUN	1	-	2	-	3
Total	**13**	**19**	**15**	**6**	**53**

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2021

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen Peradilan	92	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2.	Administrasi Persidangan	201	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dll
3.	Administrasi Perkara	251	Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara,Keuangan perkara, PNBP. Dll.
4.	Administrasi Umum	316	Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan *e-purchasing* menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, Rumah Dinas,

			Pemeliharaan Kendaraan Dinas,dll.
5.	Kinerja Pelayanan Publik	165	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum), PTSP.

b. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan pada tahun 2021 telah melakukan pemeriksaan monitoring pada 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja, seperti tabel berikut:

Tabel Data Pengawasan Monitoring Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	6	7	3	3	**19**
Peradilan Agama	2	4	4	1	**11**
Peradilan Militer	-	-	-	1	**1**
Peradilan TUN	1	-	-	1	**2**
Total	**9**	**11**	**7**	**6**	**33**

Hasil pemeriksaan monitoring tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Monitoring tahun 2021

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	75	Program Kerja, Monev Kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Notulen Rapat, Pengawasan Melekat, Tugas dan Wewenang Pejabat / Staff (Pembagian Tugas), Laporan Bulanan, Sosialisasi dan

			Laporan Penanganan Pengaduan, Hakim Pengawas Bidang.
2	Administrasi Persidangan	74	Jadwal Sidang tidak diinput dalam SIPP, Ketidaktelitian dalam pembuatan berita acara persidangan, Penyelesaian Perkara yang terlalu lama, Hakim belum menandatangani berita acara sidang, Biaya pemeriksaan setempat yang tidak terperinci, Dalam daftar isi berkas tidak mencantumkan penunjukkan jurusita oleh paniteraan, Terdapat biaya penyerahan salinan putusan kepada para pihak, Terdapat pelaksanaan persidangan perkara pidana yang tidak sesuai dengan jadwal sidang, Ketidaksesuaian penetapan hari sidang dengan pelaksanaan sidang, Terdapat pelaksanaan sidang perkara yang tidak sesuai agenda, Terdapat putusan dan penetapan yang tidak tertulis tanggal putusan / penetapan diatas materai, Ketidaksesuaian penulisan tanggal sidang pembacaan sidang dalam berita acara, Terdapat beberapa amar dalam berita acara sidang tidak sama dengan amar dalam putusan, Belum dipublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan pada situs website.
3	Administrasi Perkara	161	SK Penetapan Panjar Perkara, Ketidaksesuaian penulisan tanggal minutasi perkara dengan SIPP, Pemberitahuan Sisa Panjar,

			Pemungutan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar, Ketidaktertiban Pengisian Buku Register, Pengiriman Salinan Putusan, Laporan atas Perkara yang tidak dapat diselesaikan, Ketidaksesuaian dengan ketentuan antara SK Panjar Biaya dan Biaya Hak Kepaniteraan, Sisa Panjar Perkara yang tidak disetor ke Kas Negara, Pengelolaan Biaya (ATK), Penerimaan Uang secara Tunai tidak melalui bank, Ketidaktertiban Pelaksanaan Minutasi, Pengelolaan Biaya Proses tidak seperti sebagaimana mestinya, Jangka Waktu Penyelesaian Perkara, SK Penggunaan Biaya Proses.
4	Administrasi Umum	268	Sarana dan Prasarana kurang memadai, Kekurangan tenaga, Tidak disiplin (dalam penggunaan tanda pengenal), Jadwal Piket belum ada, Kedisiplinan Kehadiran blm maksimal, Terdapat kwitansi dimana materai tidak diberikan dengan sesuai waktu tanda tangan, Laporan Keuangan belum memberikan informasi yang memadai, Belum membuat BAST penyerahan barang, Sasaran Kerja Pegawai yang disusun oleh Hakim dan Pegawai tidak bersadarkan RKT, Fasilitas perpustakaan belum ada dan pengelolaan perpustakaan belum maksimal, Kwitansi Perjalanan Dinas tidak mencantumkan tempat asal dan

			tempat tujuan
5	Kinerja Pelayanan Publik	94	Pelayanan Bantuan Hukum, Standar Pelayanan Pengadilan, Laporan dan Biaya Perolehan Informasi, LHKPN / LHKSN, SK Meja Pengaduan, Sosialisasi Pedoman Pelayanan Informasi, Format Formulir Pelayanan Informasi, Informasi Panjar Biaya Perkara, Pelayanan Sidang dan Kebersihan, SK Penetapan PPID, Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan, Pemukhtahiran SIPP, Prosedur Pelayanan dan Keterbukaan Informasi, Penggungahan (Publikasi) dalam website, Backup secara berkala antara aplikasi database website serta PTSP, Ketidaksesuaian Pengaduan yang diinput, Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi.

c. Pemeriksaan Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2021 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 49 (empat puluh sembilan) Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	9	5	8	2	**24**
Peradilan	6	7	6	1	**20**

Agama					
Peradilan TUN	-	1	-	1	**2**
Peradilan Militer	1	-	1	1	**3**
Total	**16**	**13**	**15**	**5**	**49**

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

Catatan:

Wilayah I : Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Wilayah III : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Hasil temuan audit kinerja bidang penyelesaian perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 adalah sebagaimana grafik batang berikut:

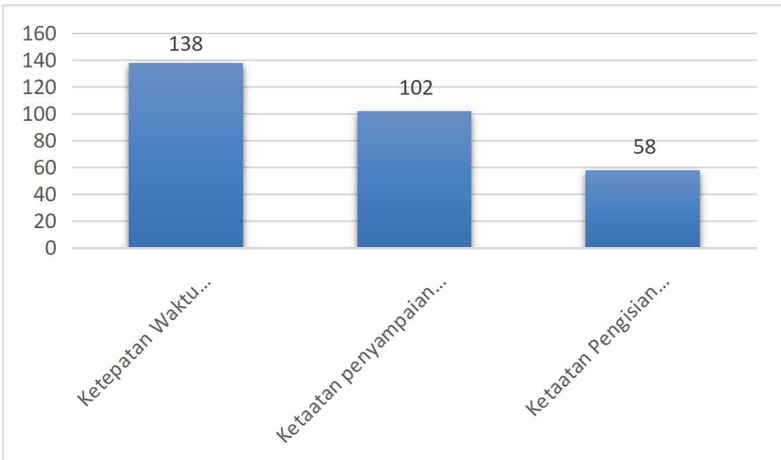

Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2021

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaikan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketepatan waktu penyelesaian perkara lebih dominan yakni mencapai 138 (seratus tiga puluh delapan) temuan (46,3%) dari 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian perkara.

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

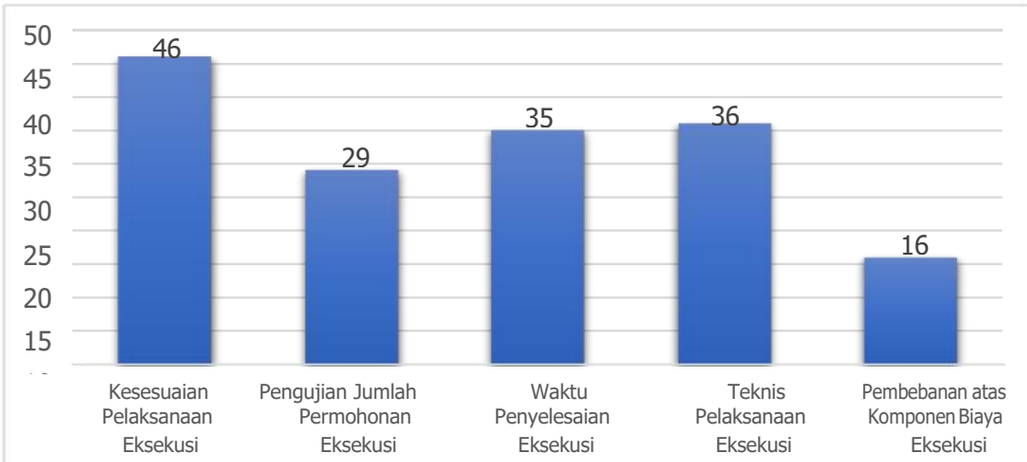

Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2021

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanan eksekusi lebih dominan yakni mencapai 46 (empat puluh enam) temuan (28,40%) dari 162 (seratus enam puluh dua) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

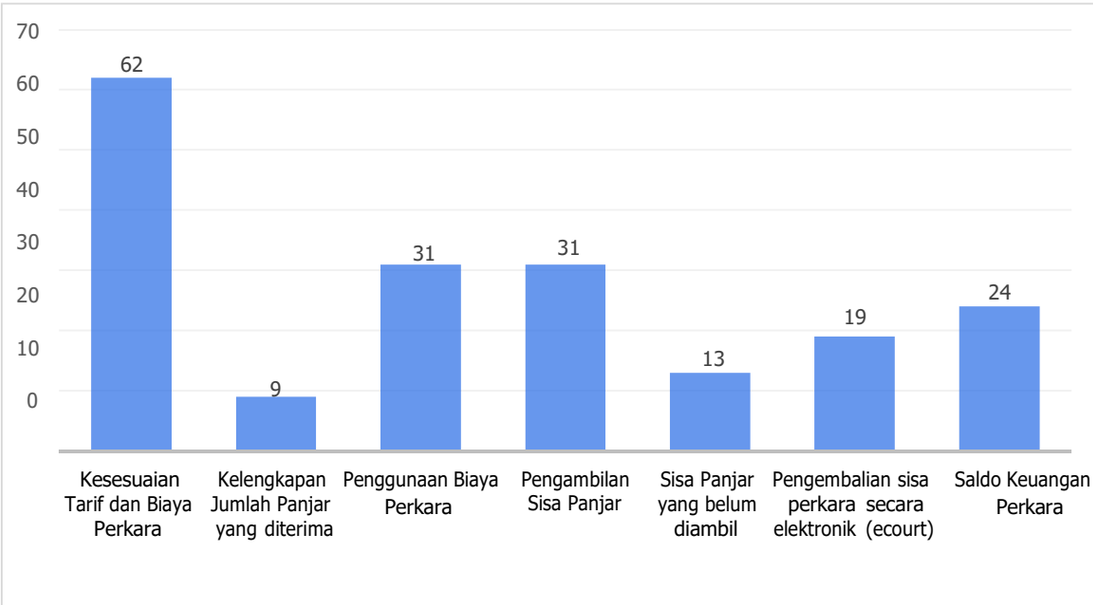

Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2021

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian dan tarif biaya perkara lebih dominan yakni mencapai 62 (enam puluh dua) temuan (34,83%) dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya kesesuaian dan tarif biaya perkara.

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

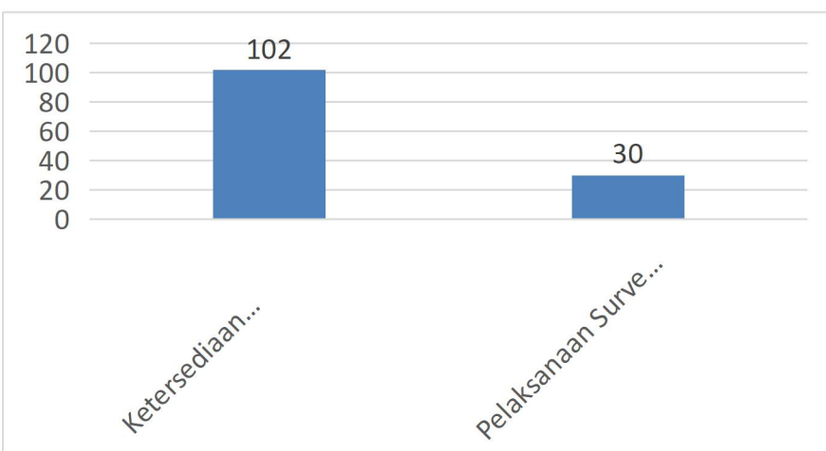

Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2021

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan Sarana dan Prasarana mencapai 102 (seratus dua) temuan (77,27%) dari 132 (seratus tiga puluh dua) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.

5. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud untuk:

1. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
2. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
3. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2019	2020
1.	>90 – 100	AA	-	-
2.	>80 – 90	A	9	12
3.	>70 – 80	BB	57	53
4.	>60 – 70	B	7	9
5.	>50 – 60	CC	-	-
6.	>30 – 50	C	1	-
7.	0 – 30	D	-	-
Jumlah			**74**	**74**

Capaian nilai SAKIP tahun 2020 terhadap 74 satuan kerja yang terdiri dari eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding semakin meningkat untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 12 satker dan kategori BB (sangat baik) yaitu 53 satker serta

kategori B (baik) yaitu 9 satker, hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah terdapat peningkatan.

Tabel Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2020 Satker Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2021)

NO.	NAMA SATKER	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN KINERJA	SKOR	KATEGORI
		BOBOT 30%	BOBOT 25%	BOBOT 15%	BOBOT 10%	BOBOT 20%		
1	BADAN PENGAWASAN	24,46	19,38	12,54	7,75	15,63	79,76	BB
2	BUA	24,77	19,00	12,23	7,75	15,00	78,75	BB
3	KEPANITERAAN	24,44	20,50	12,42	6,58	15,00	78,94	BB
4	DITJEN BADILAG	25,19	20,00	12,27	7,75	15,00	80,21	A
5	DITJEN BADILUM	23,73	19,63	12,00	7,50	15,00	77,86	BB
6	DITJEN BADIMILTUN	23,14	19,63	10,61	5,50	11,67	70,54	BB
7	BALITBANG DIKLAT KUMDIL	22,75	18,25	12,00	5,50	11,67	70,17	BB
8	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	25,77	20,50	12,89	7,29	13,54	79,99	BB
9	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	22,47	18,10	11,39	6,38	13,33	71,67	BB
10	PENGADILAN TINGGI MEDAN	22,25	18,63	10,64	7,75	10,00	69,27	B
11	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	23,79	19,26	12,05	8,08	15,00	78,18	BB
12	PENGADILAN TINGGI JAMBI	24,90	20,27	11,81	7,63	13,33	77,94	BB
13	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	25,79	18,34	12,70	7,04	15,21	79,08	BB
14	PENGADILAN TINGGI PADANG	24,90	19,75	11,34	7,38	13,33	76,70	BB
15	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	26,64	20,50	12,89	7,29	13,54	80,86	A
16	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	26,48	20,50	12,66	7,29	13,54	80,47	A
17	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA	24,94	19,63	13,41	7,13	15,00	80,09	A
18	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	24,56	20,00	11,48	7,33	13,96	77,34	BB
19	PENGADILAN TINGGI BANTEN	22,56	18,74	12,47	6,92	15,63	76,31	BB
20	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	21,14	17,29	12,00	7,67	15,63	73,72	BB
21	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	25,37	18,86	11,95	6,92	14,17	77,27	BB
22	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	21,05	17,58	11,20	5,92	10,00	65,76	B
23	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	25,58	19,26	11,67	7,50	14,38	78,39	BB
24	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	18,38	14,38	9,47	5,88	12,92	61,02	B
25	PENGADILAN TINGGI	21,68	16,06	11,67	7,00	13,96	70,37	BB

	SAMARINDA							
26	PENGADILAN TINGGI MANADO	21,86	15,94	10,73	6,25	12,29	67,07	B
27	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	23,00	17,47	12,42	7,13	15,00	75,02	BB
28	PENGADILAN TINGGI PALU	22,88	19,64	11,95	6,88	15,63	76,96	BB
29	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	22,46	18,49	11,67	7,00	13,33	72,95	BB
30	PENGADILAN TINGGI KENDARI	18,52	17,63	12,61	7,00	16,88	72,63	BB
31	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	21,48	19,49	12,66	8,29	14,58	76,50	BB
32	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	23,74	19,38	12,61	7,33	15,00	78,06	BB
33	PENGADILAN TINGGI KUPANG	20,46	18,96	11,02	8,63	11,25	70,32	B
34	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	22,39	18,63	11,58	5,00	14,58	72,18	BB
35	PENGADILAN TINGGI MATARAM	24,88	20,16	12,52	7,75	15,21	80,52	A
36	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	22,84	19,00	11,30	8,67	13,13	74,94	BB
37	PENGADILAN TINGGI AMBON	21,39	19,90	11,86	8,38	13,33	74,86	BB
38	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	23,88	18,74	11,39	7,00	15,63	76,64	BB
39	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	26,15	20,42	12,84	6,88	11,67	77,96	BB
40	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	24,54	17,85	13,17	7,96	16,67	80,19	A
41	PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL	24,35	20,79	12,05	7,00	13,96	78,15	BB
42	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	25,07	19,90	12,33	7,13	17,71	82,14	A
43	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	25,58	18,22	12,84	8,08	12,92	77,64	BB
44	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	23,51	19,15	12,70	8,08	13,96	77,40	BB
45	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	25,79	18,34	12,70	7,04	15,21	79,08	BB
46	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	23,47	19,11	12,05	7,58	12,92	75,13	BB
47	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	22,70	19,38	10,50	7,67	13,33	73,58	BB
48	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	25,25	19,74	11,53	8,08	16,04	80,64	A
49	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	20,19	15,79	10,92	6,38	13,33	66,61	B
50	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	24,45	18,10	12,19	7,13	14,17	76,04	BB
51	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	25,05	19,90	12,38	6,71	15,63	79,65	BB
52	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	24,36	18,96	12,23	8,42	13,96	77,92	BB

53	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	22,48	19,38	12,23	8,29	14,58	76,96	BB
54	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	24,61	19,90	11,11	7,00	13,33	75,95	BB
55	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	24,20	18,48	12,23	7,13	15,00	77,04	BB
56	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	24,26	19,36	12,23	6,88	16,25	78,99	BB
57	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	23,03	18,63	12,42	7,13	15,00	76,20	BB
58	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	22,82	17,85	11,48	7,00	13,96	73,12	BB
59	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	22,57	18,36	11,72	7,00	17,92	77,57	BB
60	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	22,88	*19,64*	11,95	7,00	15,63	77,09	BB
61	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	21,96	19,38	12,23	7,75	15,63	76,94	BB
62	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	23,24	19,52	12,23	6,92	18,33	80,24	A
63	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	23,62	19,89	11,11	7,42	13,13	75,17	BB
64	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	24,38	20,16	13,13	7,54	15,00	80,21	A
65	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	22,02	19,90	12,70	8,38	17,08	80,08	A
66	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	23,70	19,52	11,16	7,33	13,33	75,04	BB
67	PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN	19,72	16,84	10,88	7,04	12,29	66,77	B
68	PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA	23,31	17,61	10,03	6,71	11,25	68,91	B
69	PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA	20,90	14,64	11,16	5,50	13,33	65,53	B
70	PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR	22,19	19,64	11,95	7,00	11,67	72,44	BB
71	DILMILTAMA	23,21	18,74	11,11	5,50	15,00	73,56	BB
72	DILMILTI I MEDAN	25,06	20,27	12,89	7,00	15,63	80,85	A
73	DILMILTI II JAKARTA	21,84	17,70	11,95	7,71	15,00	74,20	BB
74	DILMILTI III SURABAYA	23,95	18,25	9,94	7,17	15,00	74,31	BB
	JUMLAH	1732,92	1396,78	880,35	532,58	1056,10	5598,61	
	RATA-RATA	**23,42**	**18,88**	**11,90**	**7,20**	**14,27**	**75,66**	**BB**

Wilayah I

No.	Unit Kerja	Nilai Per Komponen					Nilai % 2020	Kategori
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Capaian Kinerja (20%)		
1.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	23.88	18.74	11.39	7.00	15.63	**76.64**	**BB**
2.	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	25.06	20.27	12.89	7.00	15.63	**80.85**	**A**
3.	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	24.54	17.85	13.17	7.96	16.67	**80.19**	**A**
4.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	25.07	19.90	12.33	7.13	17.71	**82.14**	**A**
5.	Pengadilan Tinggi Agama Kep. Bangka Belitung	24.35	20.79	12.05	7.00	13.96	**78.15**	**BB**
6.	Pengadilan Tinggi Agama Medan	23.51	19.15	12.70	8.08	13.96	**77.40**	**BB**
7.	Pengadilan Tinggi Agama Padang	25.58	18.22	12.84	8.08	12.92	**77.64**	**BB**
8.	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	26.15	20.42	12.84	6.88	11.67	**77.96**	**BB**
9.	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	25.79	18.34	12.70	7.04	15.21	**79.08**	**BB**
10.	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	23.47	19.11	12.05	7.58	12.92	**75.13**	**BB**
11.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	25.77	20.50	12.89	7.29	13.54	**79.99**	**BB**
12.	Pengadilan Tinggi	22.47	18.10	11.39	6.38	13.33	**71.67**	**BB**

	Bangka Belitung							
13.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	23.79	19.26	12.05	8.08	15.00	**78.18**	**BB**
14.	Pengadilan Tinggi Jambi	24.90	20.27	11.81	7.63	13.33	**77.94**	**BB**
15.	Pengadilan Tinggi Medan	22.25	18.63	10.64	7.75	10.00	**69.27**	**B**
16.	Pengadilan Tinggi Padang	24.90	19.75	11.34	7.38	13.33	**76.70**	**BB**
17.	Pengadilan Tinggi Palembang	26.64	20.50	12.89	7.29	13.54	**80.86**	**A**
18.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	25.79	18.34	12.70	7.04	15.21	**79.08**	**BB**
19.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	26.48	20.50	12.66	7.29	13.54	**80.47**	**A**
20.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	19.72	16.84	10.88	7.04	12.29	**66.77**	**B**

Wilayah II

No.	Unit Kerja	Nilai Per Komponen					Nilai % 2020	Kategori
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Capaian Kinerja (20%)		
1.	PT. Jakarta	24.94	19.63	13.41	7.13	15	**80.09**	**A**
2.	PT. Bandung	24.56	20	11.48	7.33	13.96	**77.34**	**BB**
3.	PT. Banten	22.56	18.74	12.47	6.92	15.63	**76.31**	**BB**
4.	PT. Semarang	21.14	17.29	12	7.67	15.63	**73.72**	**BB**
5.	PT. Denpasar	25.37	18.86	11.95	6.92	14.17	**77.27**	**BB**
6.	PT. Surabaya	21.05	17.58	11.20	5.92	10	**65,76**	**B**
7.	PT. Yogyakarta	25.58	19.26	11.67	7.5	14.38	**78.39**	**BB**
8.	PTA. Yogyakarta	25.25	19.74	11.53	8.08	16.04	**80.64**	**A**
9.	PTA.	22.70	19.38	10.50	7.67	13.33	**73.58**	**BB**

	Banten							
10.	PTA. Semarang	20.19	15.79	10.92	6.38	13.33	**66.61**	**B**
11.	PTA. Surabaya	24.45	18.1	12.19	7.13	14.17	**76.04**	**BB**
12.	PTA. DKI Jakarta	25.05	19.9	12.38	6.71	16.63	**79.65**	**BB**
13.	PTA. Bandung	24.36	18.96	12.23	8.42	13.96	**77.92**	**BB**
14.	PTTUN. Jakarta	23.31	17.61	10.03	6.71	11.25	**68.91**	**B**
15.	PTTUN. Surabaya	20.9	14.64	11.16	5.5	13.33	**65.53**	**B**
16.	DILMILTAMA	23.21	18.74	11.11	5.5	15	**73.56**	**BB**
17.	DILMILTI II Jakarta	21.84	17.7	11.95	7.71	15	**74.2**	**BB**
18.	DILMILTI III Surabaya	23.95	18.25	9.94	7.17	15	**74.31**	**BB**

Wilayah III

No.	Unit Kerja	Nilai Per Komponen					Nilai % 2020	Kategori
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Capaian Kinerja (20%)		
1.	PT. Makassar	18.38	14.38	9.47	5.88	12.92	**61.02**	**B**
2.	PT. Agama Makassar	21.96	19.38	12.23	7.75	15.63	**76.94**	**BB**
3.	PTUN. Makassar	22.19	19.64	11.95	7	11.67	**72.44**	**BB**
4.	PT. Manado	21.86	15.94	10.73	6.25	12.29	**67.07**	**B**
5.	PTA.Manado	24.26	19.36	12.23	6.88	16.25	**78.99**	**BB**
6.	PT. Sulawesi Tenggara	18.52	17.63	12.61	7	16.88	**72.63**	**BB**
7.	PTA. Sulawesi Tenggara	22.57	18.36	11.72	7	17.92	**77.57**	**BB**
8.	PT.	22.46	18.49	11.67	7	13.33	**72.95**	**BB**

	Banjarmasin							
9.	PTA. Banjarmasin	22.82	17.85	11.48	7	13.96	**73.12**	**BB**
10.	PT. Kalimantan Timur	21.68	16.06	11.67	7	13.96	**70.37**	**BB**
11.	PTA. Samarinda	24.2	18.48	12.23	7.13	15	**77.04**	**BB**
12.	PT. Palangkaraya	23	17.47	12.42	7.13	15	**75.02**	**BB**
13.	PTA. Palangkaraya	23.03	18.63	12.42	7.13	15	**76.2**	**BB**
14.	PT. Sulawesi Tengah	22.88	19.64	11.95	6.88	15.63	**76.96**	**BB**
15.	PT. Agama Palu	22.88	*19.64*	11.95	7	15.63	**77.09**	**BB**
16.	PT. Pontianak	21.48	19.49	12.66	8.29	14.58	**76.5**	**BB**
17.	PTA. Pontianak	22.48	19.38	12.23	8.29	14.58	**76.96**	**BB**
18.	PT. Gorontalo	23.74	19.38	12.61	7.33	15	**78.06**	**BB**
19.	PT. Gorontalo	24.61	19.9	11.11	7	13.33	**75.95**	**BB**

Wilayah IV

No.	Unit Kerja	Nilai Per Komponen					Nilai % 2020	Kategori
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Capaian Kinerja (20%)		
1.	PT. Kupang	20.46	18.96	11.02	8.63	11.25	**70.32**	**B**
2.	PT. Maluku Utara	22.39	18.63	11.58	5.00	14.58	**72.18**	**BB**
3.	PT. Mataram	24.88	20.16	12.52	7.75	15.21	**80.52**	**A**
4.	PT. Jayapura	22.84	19.00	11.30	8.67	13.13	**74.94**	**BB**
5.	PT. Ambon	21.39	19.90	11.86	8.38	13.33	**74.86**	**BB**
6.	PTA. Maluku Utara	23.24	19.52	12.23	6.92	18.33	**80.24**	**A**
7.	PTA. Ambon	23.62	19.89	11.11	7.42	13.13	**75.17**	**BB**
8.	PTA. Mataram	24.38	20.16	13.13	7.54	15.00	**80.21**	**A**
9.	PTA. Kupang	22.02	19.90	12.70	8.38	17.08	**80.08**	**A**
10.	PTA. Jayapura	23.70	19.52	11.16	7.33	13.33	**75.04**	**BB**

6. PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Pada tahun 2021 Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal dalam proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah melakukan penilaian terhadap 816 (delapan ratus enam belas) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM yang terdiri dari 146 (seratus empat puluh enam) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM dan 670 (enam ratus tujuh puluh) yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai Internal merekomendasikan sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) unit kerja, yang terdiri dari 241 (dua ratus empat puluh satu) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 73 (tujuh puluh tiga) diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

Adapun rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

I. WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

A. Satker yang dievaluasi

Jumlah unit kerja yang dievaluasi 146 Unit Kerja

BERDASARKAN TIPE UNIT KERJA

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	UNIT ESELON 1	1	0.68%
2	TINGKAT BANDING	28	19.18%
3	TINGKAT PERTAMA	117	80.14%
TOTAL		146	100%

BERDASARKAN KAMAR PERADILAN

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PERADILAN UMUM	54	36.99%
2	PERADILAN AGAMA	77	52.74%
3	PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	15	10.27%
TOTAL		146	100.00%

B. Satker yang diusulkan

Jumlah Unit Kerja yang direkomendasikan untuk diusulkan memperoleh Predikat menuju WBBM: 73 Unit Kerja

BERDASARKAN TIPE UNIT KERJA

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Unit Eselon 1	1	1,38%
2	Tingkat Banding	17	23,28%
3	Tingkat Pertama	55	75,34%
TOTAL		73	100%

BERDASARKAN KAMAR PERADILAN

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peradilan Umum	21	28,76%
2	Peradilan Agama	47	64,38%
3	Peradilan Militer dan TUN	5	6,84%
TOTAL		73	100%

C. Sakter yang tidak diusulkan

Jumlah Unit Kerja Yang Tidak Direkomendasikan Untuk Diusulkan Memperoleh Predikat Menuju WBBM: 73 Unit Kerja.

BERDASARKAN TIPE UNIT KERJA

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Unit Eselon 1	0	0%
2	Tingkat Banding	11	15,06%
3	Tingkat Pertama	62	84,94%
TOTAL		73	100%

BERDASARKAN KAMAR PERADILAN

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peradilan Umum	33	45,20%
2	Peradilan Agama	30	41,10%
3	Peradilan Militer dan TUN	10	13,70%
TOTAL		73	100%

II. WILAYAH BIROKRASI BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

A. Satker yang dievaluasi

Jumlah unit kerja yang dievaluasi 670 Unit Kerja

BERDASARKAN TIPE UNIT KERJA

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	UNIT ESELON 1	2	0.30%
2	TINGKAT BANDING	35	5.22%
3	TINGKAT PERTAMA	633	94.48%
TOTAL		670	100.00%

BERDASARKAN KAMAR PERADILAN

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PERADILAN UMUM	303	45.22%
2	PERADILAN AGAMA	328	48.96%
3	PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	39	5.82%
TOTAL		670	100.00%

B. Satker yang diusulkan

Jumlah Unit Kerja yang direkomendasikan untuk diusulkan memperoleh Predikat menuju WBK: 241 Unit Kerja

BERDASARKAN TIPE UNIT KERJA

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Unit Eselon 1	2	0,83%
2	Tingkat Banding	21	8,71%
3	Tingkat Pertama	218	90,46%
TOTAL		241	100%

BERDASARKAN KAMAR PERADILAN

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peradilan Umum	97	40,25%
2	Peradilan Agama	128	53,11%
3	Peradilan Militer dan TUN	16	6,64%
TOTAL		241	100%

C. Sakter yang tidak diusulkan

Jumlah Unit Kerja yang tidak direkomendasikan untuk diusulkan memperoleh Predikat menuju WBK: 429 Unit Kerja

BERDASARKAN TIPE UNIT KERJA

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Unit Eselon 1	0	0%
2	Tingkat Banding	14	3,26%
3	Tingkat Pertama	415	96,74%
TOTAL		429	100%

BERDASARKAN KAMAR PERADILAN

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peradilan Umum	208	48,48%
2	Peradilan Agama	200	46,62%
3	Peradilan Militer dan TUN	21	4,90%
TOTAL		429	100%

Hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh TPI diuraikan sebagai berikut:

Jenis Predikat	Jumlah Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	146	73	73
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	670	241	429
Jumlah	**816**	**314**	**502**

ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN UNIT KERJA DALAM EVALUASI PMPZI OLEH TIM PENILAI INTERNAL TAHUN 2021 :

1. Data Dukung yang dilampirkan pada aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id tidak ada, tidak lengkap dan/atau tidak memadai;
2. Dalam Kegiatan Zoom Meeting terkait Presentasi Pengadilan (Khusus WBBM), masih didominasi oleh Pimpinan Pengadilan saja (hanya pimpinan dan beberapa ketua area saja), dan pada saat dikonfirmasi kepada beberapa aparatur pengadilan tesebut (melalui

telepon atau WA) hasilnya belum dapat meyakinkan evaluator bahwa pada unit kerja telah terdapat pemahaman yang sama dan tidak disampaikan secara lugas apa upaya khusus yang dilakukan satker terkait program ZI menuju WBBM tahun 2021 ini;

3. Nilai Total Tidak Memenuhi Persyaratan (85 untuk WBBM dan 80 untuk WBK;
4. Nilai Area Pengungkit tidak memenuhi persyaratan (Terbanyak Area 2);
5. Pada Komponen Hasil, Nilai Survei Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tidak memenuhi persyaratan (90 % atau 3,6);
6. Pada Komponen Hasil, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Internal dan Eksternal tidak disajikan secara memadai, dan tidak menyajikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan khususnya atas pengawasan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) sehingga TLHP ttidak mencapai 100%;
7. Pada Komponen Hasil, Nilai Survei Kepuasan Pengguna Layanan (IKM) tidak memenuhi persyaratan (90 % atau 3,6 untuk WBBM dan 80% atau 3,2 untuk WBK);
8. Tidak ada penyaringan atas Usulan Unit Kerja memperoleh predikat menuju WBK/WBBM Tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Seluruh usulan dari tingkat banding langsung diteruskan ke Sekretaris MA RI untuk dinilai oleh TPI.

7. PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung www.siwas.mahkamahagung.go.id.
2. Layanan pesan singkat / SMS / WhatsApp.
3. Surat elektronik (email).
4. Faksimile.
5. Telepon.
6. Meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Surat dan atau.
8. Kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi seluruh pengaduan baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2021 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI mengenai pungli di Pengadilan sejumlah 21 (dua puluh satu) pengaduan.

Dari 21 Pengaduan tersebut 19 pengaduan tidak terbukti dan 2 pengaduan di tindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa Badan Pengawasan.

HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Aturan Pengendalian Gratifikasi

Dilakukan revisi atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 31/BP/SK/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada diBawahnya dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 28/BP/SK/III/2021 dengan penekanan perubahan pada saluran/media pelaporan gratifikasi dan diwajibkannya seluruh hakim dan aparatur membuat surat pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi setidak-tidaknya setahun sekali diakhir bulan Desember.

2. Unit Pengendalian Gratifikasi

Memperbaharui dan membentuk Tim pelaksana UPG pada Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 27/BP/SK/III/2021 tentang Pembentukan tim Pelaksana UPG di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan masa kerja 2 (dua) tahun sejak tim dibentuk.

3. Akun Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK

Telah ditunjuk petugas sebagai admin Aplikasi Gratifikasi On Line (GOL) dan Aktivasi akun GOL UPG Lembaga Mahkamah Agung RI telah aktif dan digunakan sejak tahun 2020

4. Sosialisasi terkait Kebijakan Gratifikasi
   a. Sosialisasi mandiri terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada diBawahnya telah dilakukan di Badan Pengawasan dan Badan Urusan Administrasi BUA MA RI.
   b. Public Campaign sangat masiv dilakukan melalui pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas di seluruh satuan kerja daerah melalui banner dan pamflet
   c. Kebijakan pemutaran Audio dan kewajiban majelis disetiap memulai persidangan menyampaiakan peringatan perilaku anti gratifikasi melalui pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 17 Tahun 2019 yang pada pokoknya menghimbau kepada para pihak serta pengunjung persidangan untuk berprilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim dan aparatur peradilan lainnya,

tidak menerima/memberi tip, sogokan, suap atau janji dalam bentuk apapun terkait perkara.

5. Identifikasi titik rawan potensi gratifikasi

Telah dilakukan identifikasi titik rawan potensi gratifikasi di lingkup unit Badan Pengawasan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 13a/BP/SK/2019 tentang Penetapan Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Badan Pengawasan MA RI Tahun 2019 dan telah di turunkan dalam SOP Penanganan Benturan Kepentingan.

Tabel Jumlah Pelaporan Gratifikasi 2018 - 2021

No	Tgl. Pelaporan	Inisial Pelapor	Status	Status verifikasi
1	26/06/2021	I K D	Terverifikasi oleh UPG	Catat dan tidak perlu diproses
2	05/04/2021	M A	Diterima oleh KPK	
3	26/02/2021	M A	Diterima oleh KPK	
4	20/11/2020	M A	Diproses oleh KPK	
5	13/11/2020	M A	Diproses oleh KPK	
6	22/07/2020	S F	Terverifikasi oleh UPG	Catat dan tidak perlu diproses
7	23/03/2020	M R A	Diproses oleh KPK	
8	19/12/2019	M P S	Diproses oleh KPK	
9	19/12/2019	J B	Diproses oleh KPK	
10	17/05/2019	D R	Diproses oleh KPK	
11	17/05/2019	S N	Diproses oleh KPK	
12	14/05/2019	S H	Diproses oleh KPK	
13	30/07/2018	Syn	Diproses oleh KPK	
14	26/06/2018	Hjh	Diproses oleh KPK	

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kegiatan</th><th>Resume Hasil Pemeriksan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)</td><td>Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2021.

Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2021.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Reviu RKA K/L</td><td>Pelaksanaan Reviu RKA K/L dilaksanakan pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ</td><td>Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran pbj sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 70,52% dari rencana penyerapan dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai mencapai 76,40% senilai Rp5.289.385.324.524
b. Belanja barang mencapai 64,57% senilai Rp1.420.287.236.847
c. Belanja modal mencapai 53,24% senilai Rp852.372.435.06

Atas total realisasi sebesar 70,52% tersebut dikategorikan cukup tinggi karena jika penyerapan anggaran Mahkamah Agung dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp. 7.887.635.692.960,00 maka persentase realisasinya sudah mencapai 95,87% selain itu juga berdasarkan data dari spanint.kemenkeu.go.id berupa laporan peringkat realisasi belanja atas 87 K/L, Mahkamah Agung RI menduduki peringkat 6.

Pengadaan Barang dan Jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 289 paket dengan nilai Rp.1.123.410.705.355,00 atau 96% dari total PBJ tender yang sudah diinput di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dengan rincian sebagai berikut:

Resume Hasil Pemeriksaan
<table>
<tr><th>Posisi PBJ Melalui Tender</th><th>Jumlah Paket</th><th>Nilai (Rp)</th></tr>
<tr><td>Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021</td><td>299</td><td>1.379.828.543.000</td></tr>
<tr><td>PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP</td><td>6</td><td>206.121.473.000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP</td><td>293</td><td>1.173.707.070.000</td></tr>
<tr><td>PBJ melalui tender yang belum dilelang</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang</td><td>10</td><td>9.381.244.000</td></tr>
<tr><td>PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak</td><td>289</td><td>1.123.410.705.355</td></tr>
<tr><td>Progres fisik kontrak kurang dari 50%</td><td>143</td><td>554.538.545.150</td></tr>
<tr><td>Progres fisik kontrak 50% - 99%</td><td>58</td><td>377.773.809.895</td></tr>
<tr><td>Progres fisik kontrak 100% (PHO)</td><td>98</td><td>146.564.027.528</td></tr>
</table>

Terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum diinput ke dalam SiRUP sebesar 6 paket dengan nilai Rp.206.121.473.000,00. Hal ini disebabkan oleh Satuan kerja belum melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup sesuai dengan revisi DIPA terakhir.

Rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menghimbau satuan kerja yang melakukan revisi DIPA terakhir agar melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup. Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilelang.
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Reviu Revisi Anggaran</td><td>Reviu Revisi Anggaran dilaksanakan sesuai permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan dari 3 (tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, yakni:
a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan April 2021.
b. Pengadilan Militer II-08 Jakarta dilaksanakan pada bulan Juni 2021.
c. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP</td><td>Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP Tahun Anggaran 2021 atas realisasi PNBP Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2021.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Reviu Hibah</td><td>Reviu Hibah dilaksanakan pada unit akuntansi penggunaan Anggaran Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2021 dan satuan kerja Pengadilan Agama Curup pada bulan Januari 2021 dan Pengadilan Negeri Blitar pada bulan April 2021.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Liaison Officer (LO)</td><td>Sampai dengan semester pertama tahun 2021 diperoleh informasi melalui entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2020, menurut Auditor Utama Keuangan</td></tr>
</table>

		Negara III BPK RI selaku Penanggungjawab pemeriksa maka diperlukan Liaison Officer untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan auditee yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. Melakukan pendampingan terhadap 31 satuan kerja. Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditinjuk sebagai Liaison Officer pemerikaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya untuk Mahkamah Agung RI.
8.	Probity Audit	Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan,efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisai, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa. Probity Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakkan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku Tahun 2021, probity audit dilaksanakan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja.
9.	Audit PBJ	Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021, Audit PBJ dilaksanakan pada 4 (empat) satuan kerja.
10.	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan keuangan difokuskan pada pelaksanaan dan tata kelola keuangan DIPA dan Keuangan Perkara tahun 2021 pemeriksaan Keuangan dilaksanakan pada 8 (delapan) satuan kerja.

D. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut

hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2021 Mahkamah Agung telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampaidengan Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari
596 temuan dengan nilai temuan sebear Rp48.748.371.155,87 dengan 1.313 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp36.782.386.014,06 dengan status sebagai berikut:

1 Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.302 (99,16%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 34.138.547.186,00 (92,81%).
2 Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 (0,84%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 2.643. 838.828,06 (7,19%)

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun 2021 yang sudah dianggap selesai oleh BPK yaitu sebanyak 1.313 rekomendasi atau sebesar 100%.

E. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS MA-RI)

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2021 oleh masyarakat umum dan satuan kerja yang secara langsung menggunakan aplikasi siwas sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui SIWAS MA-RI Tahun 2021

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Pelapor secara mandiri	772
2	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	156
3	Inisiatif Tingkat Banding	70
TOTAL		**998**

F. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2021

Pemeriksaan / Kegiatan (LHP)	**Wilayah**				**Jumlah Capaian**	**Target**
	I	**II**	**III**	**IV**		
Pemeriksaan Kasus	14	41	14	6	75	88
Pemeriksaan Reguler	11	121	78	25	314	161
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	90	31	35	17	113	116
Monitoring Zona Integritas						
Pemeriksaan Monitoring	5	10	13	1	29	29
Audit Kinerja	7	8	8	3	26	31
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	9				9	4
Audit PBJ	0	0	0	0	0	4
Probity PBJ	17				17	17
Pemeriksaan Keuangan	0	0	0	0	0	6
Pemeriksaan Kepegawaian	4	4	2	1	13	8
Analisa Kebijakan Pengawasan	1	1	1	1	4	8

Catatan: Dari capaian, Realisasi Anggaran (73,89%)

Pagu : Rp 24.745.576.000,00

Realisasi : Rp. 18.283.599.041,00

Sisa : Rp. 6.461.976.959,00

G. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada tahun 2021 jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 19.495 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 98,64%.

Grafik Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2021 (Hakim)

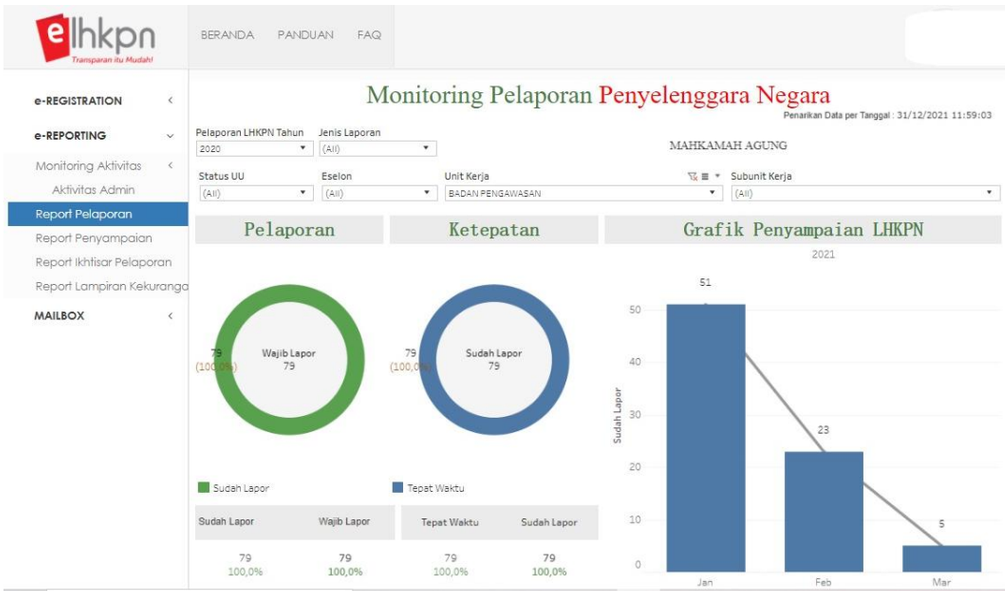

H. LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Menindaklanjuti Peraturan Sekrertaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Pada tahun 2021 Apartur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengawasan telah menyampaikan LHKASN melalui aplikasi SIHARKA sebagai berikut :

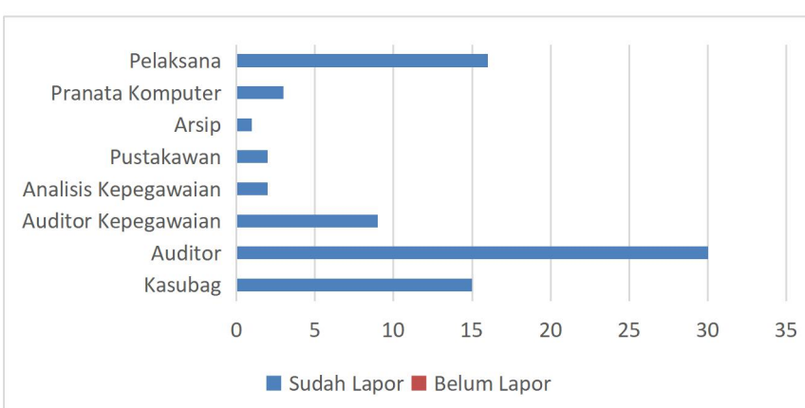

Grafik Penyampaian LHKASN tahun 2021

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan tahunan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Tahunan 2021, laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 dan sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, atas hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengelolaan

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 174 (*seratus tujuh puluh empat*) orang, yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 66 (*enam puluh enam*) orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 72 (*tujuh puluh dua*) orang dan tenaga honorer berjumlah 16 (*enam belas*) orang.

Pada tahun 2020, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 170 (*seratus tujuh puluh*) orang yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 71 (*tujuh puluh satu*) orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 83 (*delapan puluh tiga*) orang dan tenaga honorer berjumlah 16 (*enam belas*) orang.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2021 dikelompokkan :

- 2156 unit peralatan dan mesin Rp. 15.013.359.452
- 2.290 buah aset tetap lainnya Rp. 535.403.685
- 12 unit aset tak berwujud Rp. 3.254.333.180

Total pengelolaan sarana dan prasarana Rp. 18.803.096.317

Grafik 3.1 Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan

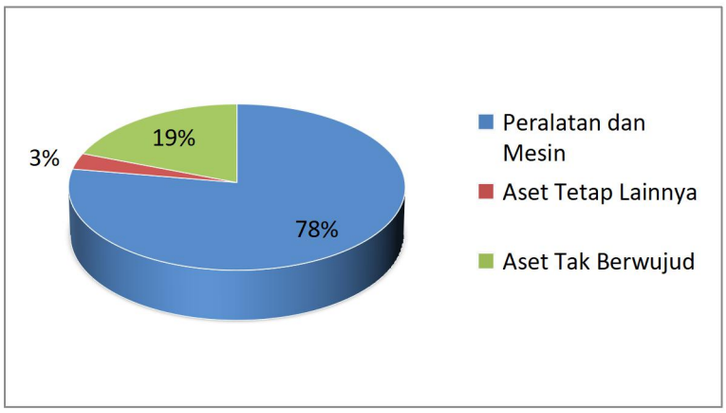

Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada :

1) Perolehan Sarana dan Prasarana

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan DIPA tahun 2021 :

2) Pembelian

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2021 adalah 57 Unit dengan Total Rp **371.892.300** (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	P.C Unit	11	110.032.500
2.	Televisi	5	39.995.000
3.	Dispenser	2	4.800.000
4.	Printer	10	25.115.000
5.	Peralatan Fitness	3	22.098.000
6.	Laptop	21	290.950.000
7.	Camera Conference	1	97.500.000
8.	CCTV	2	20.125.000
9.	Papan Visual	1	17.650.000
10.	Lemari Es	1	5.481.800
	TOTAL	**57**	**371.892.300**

2) Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2021 Tanggal 23 November 2020 dengan jumlah PAGU (REVISI KE - 3 tanggal 28 Oktober 2021) sebesar Rp. 24.745.576.000,- terdiri dari:

BELANJA PEGAWAI

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2021 yaitu:

- **Pagu : Rp. 5,847,927,000,-(1001%)**
  (lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- **Realisasi : Rp. 5.765.457.110 (98,59%)**
  (lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah)
- **Sisa : Rp. 82.469.890 (1,41%)**
  (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

1. Penanganan Pengaduan

Tahun 2021 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.069 pengaduan, dengan rincian :

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2021

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1860
2.	Pengaduan dari instansi (*stakeholder* Mahkamah Agung)	211
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	998
Jumlah		**3.069**

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2021

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		267
2.	Selesai diproses		2.802
	a. Diperiksa Tim Bawas	64	
	b. Delegasi ke Tingkat Banding	38	
	c. Konfirmasi	96	
	d. Klarifikasi	944	
	e. Memorandum / Delegasi Internal	144	
	a. Dijawab Surat	931	
	h. Pelaksanaan Pemantauan	106	
	h. Diarsipkan	53	
	i. Gabung berkas	418	
	j. Dicabut	8	
Jumlah		**2.802**	

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan yang masuk sejumlah 3.069 pengaduan dimana pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 267 pengaduan sedangkan yang telah selesai diproses sejumlah 2.802 pengaduan. data tersebut menunjukkan kinerja Badan Pengawasan dalam menyelesaikan pengaduan sebesar 91%.

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2021 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 284 aparat peradilan.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	25	23	84	132
	Hakim Ad Hoc	-	1	5	6
2	Panitera	6	5	8	19
3	Sekretaris	3	3	4	10
4	Panitera Muda	11	3	8	22
5	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6	Jurusita	1	7	2	10
7	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10	Staff	10	4	4	18
Jumlah		**74**	**60**	**150**	**284**

3. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan pada Tahun 2021 telah melakukan pemeriksaan reguler pada 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja. Pemeriksaan Reguler pada lingkungan peradilan umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Satker, peradilan agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 23 (dua puluh tiga) satker, peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 0 satker, dan peradilan TUN untuk wilayah I dan III berjumlah 3 (tiga) satker.

4. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan dalam Tahun 2021, telah melakukan pemeriksaan monitoring pada 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja. Pemeriksaan Monitoring pada lingkungan peradilan umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 19 (sembilan belas) Satker, peradilan agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 11 (sebelas) satker, peradilan Militer untuk wilayah IV berjumlah 1 (satu) satker, dan peradilan TUN untuk wilayah I dan IV berjumlah 2 (dua) satker.

5. Pemeriksaan Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2021 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 49 (empat puluh sembilan) Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	9	5	8	2	**24**
Peradilan Agama	6	7	6	1	**20**
Peradilan TUN	-	1	-	1	**2**
Peradilan Militer	1	-	1	1	**3**
Total	**16**	**13**	**15**	**5**	**49**

B. Rekomendasi

Badan Pengawasan telah berupaya secara terus menerus dalam meningkatan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik, selain itu Badan Pengawasan sebagai APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian *(assurance)* dan konsultasi *(consulting)* yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maka perlu dilaksanakan dan ditingkatkan kegiatan rutin antara lain:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)
2. Pemeriksaan Audit Kinerja
3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengembangan Aplikasi Sitem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI)

Demikian Laporan Tahunan Badan Pengawasan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Laporan ini terwujud atas kerja sama yang baik mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staff yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan.